

**Praktik Politik Uang dan Pemaknaannya oleh Kelas Menengah dalam
Pilkada 2017**

(Studi Kasus di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



ZUMROTUN NA'IMAH

1506016001

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Zumrotun Na'imah
NIM : 1506016001
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : PRAKTIK POLITIK UANG DAN PEMAKNAANNYA OLEH
KELAS MENENGAH DALAM PILKADA 2017 (Studi Kasus di
Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juli 2019

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Dr. Hj. M. Zulfah Elizabeth, M.Hum

NIP : 1962017199932001

Tanggal: 17 Juli 2019

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP : 196805051995031002

Tanggal: 18 Juli 2019

SKRIPSI
PRAKTIK POLITIK DAN PEMAKNAANNYA OLEH KELAS MENENGAH DALAM
PILKADA 2017

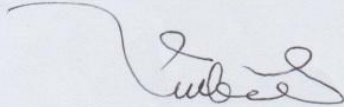
(Studi Kasus di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Disusun Oleh:
Zumrotun Na'imah
1506016001

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 29 Juli 2019 dan dinyatakan lulus

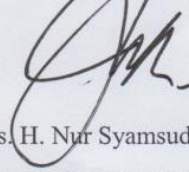
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



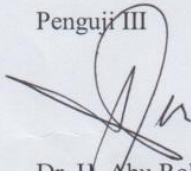
Drs. Ghufroon Ajib, M.Ag
NIP. 196603251992031001

Sekretaris/Penguji II



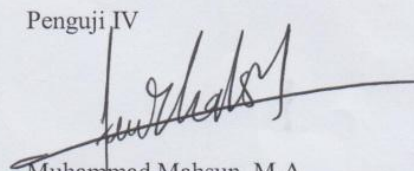
Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031002

Penguji III



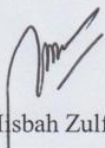
Dr. H. Abu Rohmad, M.Ag
NIP. 197604072001121003

Penguji IV



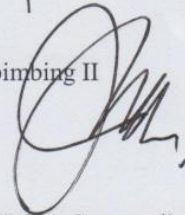
Muhammad Mahsun, M.A
NIP. -

Pembimbing I



Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum
NIP. 1962017199932001

Pembimbing II



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031002



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Juli 2019



Zumrotun Na'imah

1506016001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PRAKTIK POLITIK UANG DAN PEMAKNAANNYA OLEH KELAS MENENGAH DALAM PILKADA 2017 (Studi kasus di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)". Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.IP) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. H. Amin Farih, M.Ag dan H. Adib, S.Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum dan Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Masyarakat Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh informan yang memberikan informasi kepada penulis untuk memperoleh data.
9. Kedua orang tua penulis, Nur Khamid dan Suratemi yang tiada henti memberikan semangat, doa, dan nasihat sehingga penulis bisa mencapai pada tahap ini.
10. Bidikmisi UIN Walisongo yang telah memberi bantuan materiil kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat penulis, Sara Mulweni, Nur Inayati, Novi Lestari, Elia Apriatin, Raysa Sekar Putri, Asih Novianti, Dwi Aprilia, Rizka Indriyatussolihah, Zulfiatul Asna, Fadlilatunnaja, Fatimah NBI, Setya Pradina, Kasirul Mubarak, Rizky Agus Harnanto, dan Setya Aji Wicaksana yang telah membantu dan menyemangati penulis selama proses penyusunan skripsi.
12. Teman-teman UKM Kempo UIN Walisongo semarang, KKN, dan LPM Reference yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di bidang non akademik bagi penulis.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

- QS. Al-Isra' ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ لِيَسْتَعْوَأَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا
دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.”

- What's yours will always find you. What's yours will eventually be yours.

- Atina Maulia

ABSTRACT

Money politics is something that needs to be avoided in the conduct of elections. because this is an act which can injure the democracy in Indonesia. The practice of money politics that occurs among the public does not look at it from any group. A person's economic status can influence the process of the practice of money politics.

In this study, we will discuss the middle class' experience on money politics in Kasepuhan village in the political process in the 2017 local election. the public response to the practice of money politics, and their point of view on money politics. The researcher focus on money politics is in the practice of vote buying (vote buying).

The Kasepuhan village is a village in the Batang City area that the researcher has been researching about money politics because the practice is still going in this village. In the village there are also political figures and success teams who are used to distributing money when the election was held. The work type in Kasepuhan Village, the majority of which are traders, is the reason for the researcher to conduct research in this village. Because in terms of the economic status of those belonging to the middle class, because economic stratification can determine behavior and have influence in democracy.

In this research, the researcher use qualitative method with a phenomenological approach, phenomenological is an approach that discusses the essence of the ideal consciousness and essence of objects as a correlation with consciousness. In phenomenology research involves a detail and careful testing of the consciousness of human experience. The main concept in phenomenology is meaning. Meaning is an important content that arises from the experience of human consciousness. To identify the essential qualities of experience awareness is carried out deeply and thoroughly.

Results from the interviews on the ground, the people of Kasepuhan Village still received money before the election. Because according to them it was a natural habit when the election. The public response to the existence of money politics is to accept it. Although there are those who choose according to their wishes but still receive money from other prospective candidates. In interpreting the money politics of the Kasepuhan village people see that politics is a fortune that came when the elections time, and there is also a meaning that money politics is a reward for coming to polling stations, there are also those who manage money politics as something unclear.

Keywords: practice of money politics, response, meaning

ملخص

السياسة النقدية هي شيء يجب تجنبه في إجراء الانتخابات ، لأنه فعل يمكن أن يضر الديمقراطية في إندونيسيا. ممارسة السياسة النقدية التي تحدث بين الجمهور لا تنظر إليها من أي مجموعة. يمكن أن يؤثر الوضع الاقتصادي للشخص أيضًا على عملية ممارسة السياسة النقدية الجارية ، لأن التقسيم الاقتصادي يمكن أن يحدد السلوك ويكون له تأثير في الديمقراطية.

في هذه الدراسة ، سناقش تجربة الطبقة الوسطى في قرية كاسييهان في العملية السياسية في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٧ المتعلقة بممارسة السياسة النقدية ، والاستجابة العامة لممارسة السياسة النقدية ، ورؤيتهم في تفسير السياسة النقدية. التركيز البحثي للمؤلف على السياسة النقدية هو في ممارسة التصويت.

قرية كاسفوهان هي قرية في منطقة مدينة باتانج التي كان المؤلف يبحث فيها عن السياسة النقدية لأن الممارسة في القرية لا تزال مستمرة. يوجد في القرية أيضًا شخصيات سياسية وفرق نجاح اعتادوا على توزيع الأموال عند إجراء الانتخابات. نوع العمل في قرية كاسفوهان ، ومعظمهم من التجار ، هو سبب قيام المؤلف بإجراء البحث في القرية. لأنه من حيث الوضع الاقتصادي لأولئك الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى.

طريقة البحث التي استخدمها هي طريقة نوعية ذات مقارنة ظاهرية ، وهي أسلوب يناقش جوهر الوعي المثالي وجوهر الأشياء كعلاقة ارتباط مع الوعي. في علم الظواهر البحث يتضمن اختبار دقيق ودقيق لوعي تجربة الإنسان. المفهوم الرئيسي في الظواهر هو المعنى. المعنى هو محتوى مهم ينشأ من تجربة الوعي الإنساني. لتحديد الصفات الأساسية للتجربة يتم تنفيذها بعمق وشامل.

نتائج المقابلات على أرض الواقع أن سكان قرية كاسييهان ما زالوا يتلقون الأموال قبل الانتخابات. لأنه وفقا لهم هو الإنصاف عند الانتخابات. الرد العام على وجود السياسة النقدية هو قبولها. على الرغم من أن هناك أولئك الذين يختارون وفقا لرغباتهم ولكن لا يزال يتلقى المال من المرشحين المحتملين الآخرين. عند تفسير السياسة النقدية لسكان قرية كاسييهان ، يرون أن السياسة هي ثروة عند إجراء الانتخابات ، وهناك أيضًا أولئك الذين يفسرون تلك السياسة النقدية كمكافأة لمحبيهم إلى مراكز الاقتراع ، وهناك أيضًا سياسة نقدية كقيمة غير واضحة.

الكلمات المفتاحية: ممارسة السياسة النقدية ، الاستجابة ، المعنى

ABSTRAK

Politik uang adalah suatu hal perlu dihindari dalam pelaksanaan pemilu, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat mencederai demokrasi di Indonesia. Praktik politik uang yang terjadi dikalangan masyarakat tidak memandang dari golongan manapun. Status ekonomi seseorang dapat juga mempengaruhi proses praktik politik uang yang berjalan, karena stratifikasi ekonomi bisa menentukan perilaku dan mempunyai pengaruh dalam demokrasi.

Dalam penelitian ini membahas pengalaman kelas menengah di kelurahan Kasepuhan dalam proses politik pada pilkada 2017 terkait dengan praktik politik uang, respon masyarakat terhadap adanya praktik politik uang, dan pandangan mereka untuk memaknai adanya politik uang. Fokus penelitian penulis pada politik uang yaitu pada praktik pembelian suara (*vote buying*).

Warga kelurahan Kasepuhan merupakan desa di kawasan Kota Batang yang sudah penulis teliti mengenai politik uang karena praktik itu di desa tersebut masih berjalan. Di Kelurahan Kasepuhan tokoh politik dan tim sukses yang sudah biasa untuk membagikan uang ketika pilkada. Jenis pekerjaan di Kelurahan Kasepuhan yang mayoritas sebagai pedagang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut, karena dari segi status ekonomi mereka yang tergolong sebagai kelas menengah.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang membahas tentang esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi dengan kesadaran. Penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti.

Hasil dari wawancara di lapangan bahwa masyarakat Kelurahan Kasepuhan menerima uang ketika menjelang pilkada, karena menurut mereka hal itu merupakan sebuah kewajiban ketika pilkada. Respon masyarakat terhadap adanya politik uang yaitu menerimanya. Meskipun ada yang memilih sesuai dengan keinginan mereka namun tetap menerima uang dari calon kandidat lain. Dalam memaknai politik uang masyarakat Desa Kasepuhan memandang bahwa politik suatu rezeki ketika pilkada, dan ada juga yang memaknai bahwa politik uang sebagai upah untuk datang ke TPS, ada pula yang memandai politik uang sebagai sesuatu yang belum jelas (*syubhat*).

Kata kunci: praktik politik uang, respon, makna

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRACT	ix
ملخص	x
ABSTRAK	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
PATRONASE MASYARAKAT KELAS MENENGAH	Error! Bookmark not defined.
A. Patronase Politik	Error! Bookmark not defined.
B. Kelas Menengah	Error! Bookmark not defined.
C. Pemaknaan	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
KELURAHAN KASEPUHAN SEBAGAI SETTING PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum	Error! Bookmark not defined.
B. Dinamika Pilkada 2017 di kelurahan Kasepuhan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.

PRAKTIK POLITIK UANG DAN PEMAKNAANNYA Error! Bookmark not defined.

- A. Pengalaman Kelas Menengah dalam Proses Politik di Batang terkait Politik Uang Error! Bookmark not defined.**
- B. Sikap Kelas Menengah terhadap Praktik Politik Uang Error! Bookmark not defined.**
- C. Masyarakat Desa Kasepuhan dalam Memaknai Politik UangError! Bookmark not defined.**

BAB VError! Bookmark not defined.

PENUTUPError! Bookmark not defined.

- A. KesimpulanError! Bookmark not defined.**
- B. SaranError! Bookmark not defined.**

Daftar Tabel

TABEL 1.....	Error! Bookmark not defined.
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA	Error! Bookmark not defined.
TABEL 2.....	Error! Bookmark not defined.
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT	Error! Bookmark not defined.
KELURAHAN KASEPUHAN.....	Error! Bookmark not defined.
TABEL 3.....	Error! Bookmark not defined.
JENIS MATA PENCAHARIAN KELURAHAN KASEPUHAN..	Error! Bookmark not defined.
defined.	
TABEL 4.....	Error! Bookmark not defined.
TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ...	Error! Bookmark not defined.
KELURAHAN KASEPUHAN.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5	Error! Bookmark not defined.
Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Batang 2017	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Tabel 6	Error! Bookmark not defined.
MEKANISME PRAKTIK POLITIK UANG	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7	Error! Bookmark not defined.
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG PEMBERIAN UANG SEWAKTU PILKADA	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8	Error! Bookmark not defined.
MAKNA POLITIK UANG (VOTE BUYING).....	Error! Bookmark not defined.

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Peta TPS Kelurahan Kasepuhan Pada Pilkada 2017
- Lampiran 2. Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Kasepuhan Pada Pemilihan Kepala Daerah 2017
- Lampiran 3. Berita Acara tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Periode 2017-2022 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang
- Lampiran 4. Keputusan KPU Batang
- Lampiran 5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik uang merupakan sebuah praktik penyimpangan pemilu yang bisa ditemukan dalam proses politik elektoral, termasuk didalam pemilihan kepala daerah yang merupakan suatu proses pemilihan pemimpin daerah melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini telah diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), terdapat 600 kasus dugaan politik uang pada pelaksanaan pilkada serentak 2017 yang diselenggarakan di 101 daerah (Putra, 2017: Kompas.com). Dari 101 daerah pemilihan, politik uang tersebut bukan terjadi di satu daerah saja, namun beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Bangka Belitung, dan masih ada beberapa daerah yang masih menjadi daerah indikasi adanya politik uang yang diselidiki oleh BAWASLU (Irmasari, 2017:Detik.com). Di daerah yang terbukti adanya kasus politik uang sudah ditindaklanjuti oleh BAWASLU mengenai konsekuensinya, yaitu dengan mendiskualifikasi dan juga ada hukum pidana yang sesuai dengan jenis pelanggaran politik uang tersebut (Ramdhani, 2017:Sindonews.com).

Politik uang merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi baik milik pribadi atau partai untuk memperoleh suara pemilih (Kumolo, 2015:155). Beberapa contoh kasus politik uang yang ada di Indonesia seperti kasus politik uang di Kalimantan Tengah pada pemilihan gubernur tahun 2000 (Rifai, 2003:21), kasus politik uang di Bener Meriah, Aceh pada pemilihan legislatif tahun 2009 (Jafar, 2015:73), politik uang dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2002 (Rifai, 2003:54), politik uang di Temanggung pada pilkada 2018 yang ditemukan oleh PANWASLU yang kini telah dilimpahkan kepada polisi (Permana, 2018:Merdeka.com). Kasus politik uang yang juga terjadi di daerah Banyumas pada Pilbup 2018 yang ditangani oleh Panwaslu setempat untuk ditindaklanjuti kasus tersebut dengan mengadakan rapat pleno untuk menyikapi kasus tersebut (Aziz, 2018:Merdeka.com).

Beberapa kajian menunjukkan bahwa terjadinya politik uang merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua lapisan masyarakat, karena dapat menciderai tujuan dari demokrasi. Dampak dari pengaturan dana kampanye yang buruk akan juga turut dirasakan oleh publik di daerah dalam bentuk kebijakan yang buruk, (pasca pilkada akan lahir kebijakan) yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini bisa terjadi jika penyumbang yang memberikan dukungan sebagai investasi politik dalam bentuk sumbangan dana kampanye pada waktu pemilu mendapat konsensi dan *privilege* tertentu oleh pemerintahan yang berkuasa (Badoh, 2010:4). Schaffer dalam Winardi (2009) mengingatkan kita bahaya politik uang dalam mobilisasi pemilu, yaitu: (1) hasil pemilu tidak sah; (2) politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan mendaur ulang politisi korup; (3) melanggengkan pelayanan yang bersifat *clientelistic* ke konstituen (*wrong incentive*); (4) kualitas perwakilan merefleksikan dari mereka yang dibayar, tidak berdaya dan miskin; serta (5) menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor.

Sebagian masyarakat yang sudah mengerti dampak dari politik uang menegaskan bahwa mereka menolak politik uang ketika pemilu. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kota Malang yang menggelar aksi tolak politik uang di depan Gedung Balaikota Malang menjelang pemilihan legislatif 2014 (Ainun, 2014). Masyarakat di Dusun Tirondo Sulawesi Barat juga mendeklarasikan kampung halamannya sebagai “Kampung Bebas Politik Uang”. Keresahan warga terhadap sikap pemilih dan tim pasangan bakal calon bupati maupun gubernur yang sering melakukan politik uang mendorong warga untuk menolak adanya politik uang lewat aksi tersebut (Junaedi, 2018). Dari dua contoh aksi penolakan uang tersebut mulai terlihat tumbuhnya kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang untuk kemajuan demokrasi Indonesia ke depan, bahwa seorang pemimpin tidak lahir hanya dari uang yang mereka terima untuk memimpin dengan baik selama satu periode mendatang.

Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktik politik uang tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa politik uang secara normatif adalah perilaku yang harus dihindari (Kana, 2003: 228). Studi

Nico L. Kana (2001:9) di Kecamatan Suruh, misalnya menemukan bahwa pemberian uang (*money politics*) sudah biasa berlangsung di tiap pilkades pada masa sebelumnya, oleh masyarakat setempat hal ini dipandang sebagai simbol tali asih. Perihal politik uang dari sudut pemilih di pilkada, Sutoro Eko (2004) juga mempunyai penjelasan. Menurutnya, politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Hal-hal yang disebut oleh Sutoro Eko itu setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani (dkk) (2008), yang menemukan pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang yang ditujukan untuk pemilih melalui "perantara politik" berpengaruh di setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan "rasional" bagi kandidat yang akan mencalonkan diri di daerah tersebut.

Husodo (2009:52) melihat praktik politik uang dari kacamata ekonomi, menurutnya politik uang muncul karena adanya hubungan mutualisme antara partai, politisi, atau perantara dan rakyat. Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme politik uang bagi politisi, politik uang merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, politik uang ibarat bonus rutin dimasa pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.

Praktik politik uang biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki status ekonomi rendah, karena tingkat pengetahuan dan pendapatan yang rendah mudah dipengaruhi oleh uang. Secara garis besar, klasifikasi status sosial ekonomi menurut Coleman dan Cressey dalam Sumardi (2004) adalah status sosial ekonomi atas dan status sosial ekonomi bawah. Sedangkan Sitorus (2000) menyatakan bahwa status sosial ekonomi atas merupakan kedudukan di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut harta kekayaan yang dimiliki di atas rata-rata dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Wijaksana (1992) menyatakan bahwa masyarakat dengan status sosial atas biasanya yang jumlahnya relatif sedikit dan tinggal di kawasan perkotaan.

Kelas menengah merupakan sebuah konsep yang belum jelas. Sebutan kelas menengah Indonesia juga perlu dipertanyakan karena tidak adanya

kesadaran dan kepentingan yang sama diantara berbagai kelompok tersebut. Kriteria kesamaan kekuatan dan relasi produksi, sebagaimana menjadi kriteria pendekatan struktural juga belum bisa digunakan sebagai kriteria untuk menentukan kelas menengah Indonesia. Kriteria kesamaan memperoleh akses dalam proses pembangunan dapat dianggap sebagai *common denominator* yang mempersatukan berbagai kelompok didalam kelas menengah Indonesia. Yang dimaksud dengan akses disini adalah peluang memperoleh dan menikmati hasil-hasil pembangunan, informasi, pendidikan, hubungan dengan dunia luar secara langsung, mobilitas vertikal dan horisontal, serta penguasaan aset dalam jumlah besar. Penguasaan aset dapat berupa kepemilikan sejumlah kekayaan fisik dan non-fisik, seperti keahlian, keterampilan, serta kedekatan dengan kelompok elite (Subianto, 1999:23).

Contoh penelitian yang sudah dilakukan oleh Dewi, dkk (2015) yang berjudul “*Jakarta: Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan di Kota Metropolitan*”, mengkaji tentang bagaimana strategi yang digunakan untuk mendapatkan suara di daerah metropolitan. Biasanya, strategi patronase sangat cocok untuk dijadikan cara efektif di daerah-lain, namun tidak dengan daerah perkotaan. Para kandidat menggunakan cara-cara alternatif patronase untuk mendapatkan suara pemilih dengan berbagai upaya yang dirasa relevan digunakan untuk meyakinkan pemilih, seperti dialihkan dalam bentuk popularitas kandidat, menggunakan broker-broker di daerah kelas menengah bawah, dan blusukan. Namun demikian, masyarakat di Jakarta lebih tertarik dengan kandidat yang mempunyai jaringan dengan lembaga negara dan bisa membantu mereka mendapatkan akses program, sehingga para kandidat saling berkompetitif untuk membuat berbagai strategi agar bisa mendapatkan suara pemilih. Dengan demikian juga bisa terbentuk politik hibrid: dalam satu wilayah, ditampilkan program-program pelayanan kesejahteraan sosial dan sekaligus dimunculkan pola hubungan patronase antara pemilih dan kandidat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Paskarina (2015) yang berjudul “*Jawa Barat: Silaturahmi, Jaringan Personal, dan Politik Patronase*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa silaturahmi digunakan sebagai strategi untuk memperoleh suara rakyat oleh kandidat. Dalam forum tersebut, para kandidat bisa mengetahui aspirasi dan keinginan masyarakat secara langsung, sehingga cara tersebut lebih efektif dan mudah untuk mendapatkan suara di tingkat *grass root*. Silaturahmi

sebagai model kampanye tidak hanya dibentuk oleh tradisi kultural yang menekankan pada kedekatan hubungan personal dan ikatan emosional, tetapi juga melalui jaringan klientelistik yang tetap dipelihara dengan cara penyaluran dana aspirasi, bantuan sosial, pemberian izin, dan berbagai praktik patronase lainnya.

Berdasarkan dua contoh penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa politik uang masih banyak terjadi di masyarakat. Sasaran yang dilakukan kepada masyarakat kelas bawah karena mereka lebih mudah untuk dipengaruhi sehingga bisa mendapatkan suara pemilih dengan cara yang sederhana seperti melakukan pertemuan, melalui keluarga dan tokoh-tokoh berpengaruh di wilayahnya. Untuk itu, penulis ingin melakukan penelitian di masyarakat kelas menengah untuk membuktikan asumsi penulis tentang adanya praktik politik uang yang terjadi dan mengetahui respon yang diberikan mengenai politik uang.

Praktik politik uang yang terjadi di masyarakat saat pemilu memang masih terjadi, meskipun banyak yang sudah menolak adanya pelanggaran tersebut. Seperti yang terjadi di daerah Bandung Barat ketika pemilu legislatif 2014 bahwa masyarakat yang menerima politik uang masih banyak daripada yang menolak. Hal tersebut dikarenakan adanya hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) yang terjadi di hampir setiap wilayah yang ada di Bandung Barat, terutama daerah-daerah yang cukup terpencil dan relatif tidak terawasi oleh penyelenggara (panwaskab). Faktor lain juga terkait dengan tingkat pendidikan, dimana ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula kecenderungan untuk menolak atau menganggap bahwa politik uang adalah sesuatu yang tidak wajar atau bertentangan dengan peraturan, moral dan etika. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin kecil tingkat penolakan terhadap praktik politik uang (KPU, 2014).

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang praktik politik uang di Batang, Jawa Tengah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017. Obyek penelitian penulis yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan Kabupaten Batang dengan merujuk pada sebuah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Mahsun yang berjudul "*Peasants and Politics: Achievements and Limits of Popular Agency in Batang, Central Java*". Penelitian tersebut mengkaji tentang strategi pilkada yang dimenangkan oleh Wihaji-Suyono mendapatkan suara sebanyak 57%. Kemenangan Wihaji-Suyono dilaporkan merupakan hasil dari pembelian suara (*vote buying*) secara besar-

besaran. Amplop yang dibagikan oleh pasangan Wihaji-Suyono sebanyak 400.000 amplop berisi uang tunai didistribusikan para pendukungnya (Mahsun, 2017:483). Dari penelitian tersebut politik uang terbukti ada di dalam pilkada 2017, oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian tentang praktik politik uang dikalangan kelas menengah kota untuk membuktikan asumsi penulis tentang adanya praktik politik uang dan mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang pemaknaan politik uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman kelas menengah dalam proses politik di Batang terkait dengan politik uang dalam pilkada serentak 2017?
2. Bagaimana tanggapan kelas menengah terhadap praktik politik uang?
3. Bagaimana kelas menengah memaknai politik uang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman kelas menengah dalam proses politik di Batang terkait dengan politik uang dalam pilkada serentak 2017.
2. Untuk mengetahui tanggapan kelas menengah terhadap praktik politik uang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemaknaan kelas menengah tentang politik uang yang dilaksanakan pada pilkada Batang 2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan politik khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang praktik politik uang yang terjadi di kalangan masyarakat menengah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara kandidat beserta anggota tim suksesnya melakukan politik uang di kalangan kelas menengah.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi elemen masyarakat lain bahwa makna dari politik uang tidak bisa digeneralkan menjadi satu definisi mutlak.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai masukan untuk jurusan Ilmu Politik dalam memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana politik uang bisa terjadi di berbagai kalangan masyarakat dengan sudut pandang akademis.
- b) Agar dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa dalam memahami praktik politik uang yang terjadi di masyarakat.
- c) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara menerapkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai teori politik uang dan pemaknaannya dalam pilkada Batang 2017.
- d) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang politik uang bukan merupakan studi yang baru karena telah banyak ahli yang mengkaji tentang politik uang. Dari beragam studi itu, penulis memetakan fokus kajian dalam tiga kelompok.

Pertama, Praktik politik uang dan politik identitas; Jafar (2015) dalam penelitiannya di Aceh yang berjudul "*Bener Meriah, Aceh: Politik Uang dan Politik Etnisitas di dapil Baru*". Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana persepsi publik tentang praktik politik uang selama pemilihan legislatif, termasuk bagaimana respon publik terhadap masalah ini dan tingkat objektivitas mereka untuk memilih kandidat (Jafar, 2015:73).

Penelitian lain yang berjudul “*Medan, Sumatera Utara: Antara Politik Etnik dan Politik Uang*” oleh Damanik (2015). Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh politik etnis untuk mencari suara sebanyak-banyaknya ketika pemilu. Pada pembahasan ini, timses dinilai kurang relevan dalam mengejar target suara yang diharapkan, maka dari itu, politik etnis dan agama dirasa lebih kuat dan lebih relevan untuk dijadikan alat dalam mencari dukungan (Damanik, 2015:100).

Adapun penelitian lain yang berjudul “*Bangka Belitung: Patronase dan Politik Identitas dalam Masyarakat Majemuk*” oleh Ibrahim (2015). Kajian ini membahas tentang beberapa pola mobilisasi politik seperti variasi politik yang dilakukan kandidat untuk mendapatkan massa, struktur kampanye yang digunakan oleh kandidat, dan pola identitas berbasis jaringan dan pola kampanye yang digunakan oleh para kandidat. Dalam konteks ini, strategi patronase merupakan cara yang tepat juga sederhana untuk mendapatkan suara terbanyak (Ibrahim, 2015:126).

Kedua, praktik politik uang dan pragmatisme pemilih; Mahsun (2015) dalam penelitiannya di Palembang yang berjudul “*Dana Aspirasi dan Politik Klientelisme (studi kasus Kota Palembang, Sumatera Selatan)*”. Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan dana aspirasi yang digunakan secara menyimpang oleh politisi. Dana aspirasi yang biasanya digunakan sebagai patronase yang bertujuan membangun klientelisme dengan pimpinan kelompok masyarakat dan pemilih yang memberikan keuntungan elektoral bagi mereka (Mahsun, 2015:174).

Penelitian lain yang berjudul “*Jakarta: Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan di Kota Metropolitan*” oleh Dewi, dkk (2015). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana strategi yang digunakan untuk mendapatkan suara di daerah metropolitan. Biasanya, strategi patronase sangat cocok untuk dijadikan cara efektif di daerah lain, namun tidak dengan daerah perkotaan. Para kandidat menggunakan cara-cara alternatif patronase untuk mendapatkan suara pemilih dengan berbagai upaya yang dirasa relevan digunakan untuk meyakinkan pemilih, seperti dialihkan dalam bentuk popularitas kandidat, menggunakan broker-broker di daerah kelas menengah bawah, dan blusukan. Namun, masyarakat di daerah Jakarta lebih tertarik dengan kandidat yang bisa menghubungkan dengan lembaga negara dan membantu mereka mendapatkan

akses program. Oleh karena itu, para kandidat berkompetitif untuk membuat berbagai strategi agar bisa mendapatkan suara pemilih, dengan demikian juga bisa terbentuk politik hibrid: dalam satu wilayah, ditampilkan program-program pelayanan kesejahteraan sosial dan sekaligus dimunculkan pola hubungan patronase antara pemilih dan kandidat (Dewi dkk, 2015:222).

Ketiga, praktik politik uang dan modal sosial; Paskarina (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “*Jawa Barat: Silaturahmi, Jaringan Personal, dan Politik Patronase*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa silaturahmi digunakan sebagai strategi untuk memperoleh suara rakyat oleh kandidat. Dalam forum tersebut, para kandidat bisa mengetahui aspirasi dan keinginan masyarakat secara langsung, sehingga cara tersebut lebih efektif dan mudah untuk mendapatkan suara di tingkat *grass root*. Silaturahmi sebagai model kampanye tidak hanya dibentuk oleh tradisi kultural yang menekankan pada kedekatan hubungan personal dan ikatan emosional, tetapi juga melalui jaringan klientelistik yang tetap dipelihara dengan cara penyaluran dana aspirasi, bantuan sosial, pemberian izin, dan berbagai praktik patronase lainnya (Paskarina, 2015:272).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hamdi (2015) yang berjudul “*Madiun, Jawa Timur: Peran Broker dalam Strategi Teritorial, Jaringan Sosial, dan Pembelian Suara*”. Kajian ini menjelaskan tentang bergantungnya para kandidat kepada broker yang memiliki peran kuat untuk memperoleh suara pemilih. Jika para kandidat ingin membagikan uang langsung kepada pemilih, mereka menggunakan jasa broker yang paling tahu siapa saja pemilih yang berhak menerima. Hal tersebut berimplikasi pada ketergantungan kandidat dengan broker. Dalam kondisi tersebut, tidak sedikit broker yang memanfaatkan keadaan untuk mendapat keuntungan dari para kandidat. dengan kondisi tersebut, maka demokrasi di Indonesia secara tidak langsung telah terjadi praktik politik baru yang bersifat parasit (Hamdi, 2015:403).

Adapun penelitian lain yang berjudul “*Kabupaten Kapuas: Peran Uang, Barang, dan Keluarga dalam Memenangkan Caleg*” yang dilakukan oleh Aswad (2015). Penelitian ini membahas tentang pendistribusian *vote buying* yang dilakukan oleh jaringan keluarga. Ikatan emosional yang kuat antara kandidat dengan keluarga membuat keluarga sulit dipengaruhi oleh kandidat lain, dan jaringan keluarga biasanya dapat diandalkan dalam bekerja serta mereka tidak akan mengkhianati kandidat yang berasal dari keluarganya (Aswad, 2015:430).

Kelompok pertama lebih banyak membahas terkait bagaimana cara elite politik melakukan praktik politik uang terjadi di daerah sasarannya. Kelompok kedua lebih membahas pada petron-klien yang dijadikan sebagai sasaran politik uang. Dan kelompok ketiga lebih banyak menyimpulkan bagaimana politik uang yang terjadi di masyarakat dengan berbagai pola dan strategi.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis ingin memperkuat pada kelompok kedua, yaitu politik uang berkaitan dengan pragmatisme pemilih. Penulis meneliti bagaimana *Praktik Politik Uang Dan Pemaknaannya oleh Kelas Menengah Dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus di Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)*. Berdasarkan penelitian di atas ditegaskan bahwa penelitian yang sudah penulis lakukan belum pernah dikaji, oleh karena itulah penulis melakukan penelitian terkait praktik politik uang yang terjadi di kelas menengah, dan bagaimana masyarakat kelas menengah memaknai politik uang tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang membahas tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi dengan kesadaran (Donny, 2005:150). Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti (Smith, etc., 2009: 11).

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus

“divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya melakukan observasi lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti melakukan validasi dengan cara evaluasi diri, seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya (Sugiyono, 2016:222).

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang praktik politik uang dan pemaknaannya oleh kelas menengah atas dalam pilkada Batang 2017. Dengan menggunakan metode dan pendekatan yang penulis paparkan di atas untuk membuktikan asumsi awal penulis bahwa politik uang bisa terjadi pada kelas menengah karena itu penting untuk menguji kebenarannya.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi pertama (*informan*) dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, narasumber dipilih dengan mendasar pada subyek yang terlibat dalam praktik politik uang dan menguasai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

Adapun informan tersebut terdiri dari beberapa elemen masyarakat, yaitu: Para kandidat bupati dan wakil bupati yang berkontestasi dalam pilkada Kab. Batang tahun 2017 atau yang mewakili, para tim sukses atau broker politik, masyarakat yang terlibat politik uang, anggota partai politik, KPU dan BAWASLU.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya. Data

sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder ini berupa data-data yang diperoleh dari informasi informan yang berasal dari *civil society* dan masyarakat lokal, pihak media dan dokumen terkait penyelenggara pemilu yang dikumpulkan dari instansi-instansi terkait seperti KPU, PPS Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kasepuhan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:240). Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Dalam hal dokumen, Bogdan (1982) menyatakan "*In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief*". Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih bisa dipercaya apabila didukung oleh sejarah di wilayah penelitian. Hasil penelitian juga semakin bisa dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis yang telah ada (Sugiyono, 2016:240).

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Esteborg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai berikut "*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*". Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016:231).

c. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan panduan wawancara. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi tiga kelompok

yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat dipergunakan begitu saja, analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini setidaknya melalui tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016:252). Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memilah data, memusatkan perhatian dan penyederhanaan data, abstraksi dan transformasi data-data yang muncul di lapangan terkait dengan praktik politik uang di Kabupaten Batang. Proses ini berjalan terus menerus selama penelitian berlangsung untuk seara cermat melakukan penggolongan, penajaman, pembuangan data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk tahap analisis berikutnya. Tahap berikutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tertentu; naratif-deskriptif, matrik, bagan, jaringan, tabel, dan sebagainya sehingga lebih mudah melihat apa yang terjadi di lapangan dan lebih memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data ini termasuk juga kegiatan memasukkan data-data yang dianggap relevan ke dalam bab-bab pembahasan. Penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah semua tahap di atas dilalui, namun penarikan kesimpulan-kesimpulan kecil terjadi secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung sampai mendapatkan suatu

kesimpulan akhir yang kokoh dari keseluruhan data yang telah direduksi dan disistematisasikan.

Analisis data yang digunakan penulis lebih melakukan fokus pada wawancara dengan informan kunci tentang bagaimana praktik politik uang yang terjadi di Desa Kasepuhan, bagaimana penanganan yang digunakan untuk menyikapi politik uang dan pemaknaan oleh masyarakat kelas menengah terhadap politik uang. Data juga diperkuat dengan data dan dokumen yang penulis dapatkan dari instansi-instansi yang berkaitan dengan pemilu. Analisis yang dilakukan mengacu pada teori-teori substansi akademik yang penulis paparkan di bab selanjutnya yaitu mengkolaborasi teori patronase dengan teori kelas menengah yang disesuaikan dengan data yang ada di lapangan.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data dengan teori-teori politik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang politik uang dan teori tentang kelas menengah untuk menjadikan penelitian lebih kuat dan dapat dipercaya baik dari segi akademik maupun empirik. Data-data yang didapat dari penelitian juga sangat membantu dalam perkembangan analisis yang akan menjadi rujukan untuk hasil penelitian dengan menggunakan analisis politik uang.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat terarah dengan baik dan mudah untuk dimengerti, maka penulisannya dibagi dalam lima bab, antara lain sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian utama skripsi mencakup 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Manfaat Penelitian

1.5. Tinjauan Pustaka

1.6. Metode Penelitian

1.7. Sistematika Penulisan

Bab II: Patronase Masyarakat Kota Kelas Menengah

2.1. Patronase Politik

2.2. Kelas Menengah

2.3. Pemaknaan

Bab III: Kelurahan Kasepuhan Sebagai Setting Penelitian

3.1. Gambaran Umum Desa Kasepuhan

3.2. Dinamika Pilkada 2017 di Kelurahan Kasepuhan

Bab IV: Praktik Politik Uang dan Pemaknaannya

4.1. Pengalaman kelas menengah dalam proses politik di Batang terkait dengan politik uang dalam pilkada serentak 2017

4.2. Sikap kelas menengah terhadap praktik politik uang

4.3. Kelas menengah dalam memaknai politik uang

Bab V: Penutup

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

3. Bagian Akhir skripsi mencakup daftar pustaka dan lampiran.

Daftar pustaka berisi tentang sumber rujukan atau referensi yang digunakan untuk penyusunan proposal penelitian. Daftar pustaka yang disusun hanya memuat sumber yang dirujuk.

Dalam lampiran terdapat informasi yang diperoleh dalam penelitian yang penting dan mendukung laporan hasil penelitian, tetapi tidak bisa disajikan pada bagian utama penelitian. Lampiran data penelitian diantaranya; gambar lokasi, suar-surat, dokumentasi aktivitas yang relevan dengan penelitian, dan panduan wawancara.

BAB II

MASYARAKAT KELAS MENENGAH

A. Patronase Politik

Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun keduanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang. Definisi patronase dalam politik adalah pertukaran keuntungan yang bertujuan untuk memperoleh dukungan politik. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih (Aspinall dan Sukmajati, 2015:4).

Scott (1972:92) berargumen bahwa: *The patron-client relationship-an exchange relationship between roles-may be defined as a special case of dyadic (two-person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron.* Sedangkan, Lande (1977:xx) mendefinisikan relasi patronase ini sebagai berikut: *A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e., an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client.*

Merujuk pada uraian di atas, patronase ada karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Di satu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status, maupun pengaruh. Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber daya yang dimiliki seorang patron. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang

berlandaskan “pertukaran kepentingan.” Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menekankan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiiaannya kepada sang patron.

Di dalam hubungan patron-klien juga terdapat hubungan resiprositas, yang memiliki nilai dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, norma resiprositas dalam hubungan patron-klien memiliki prinsip bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya jangan sampai merugikannya (Scott, 1989, hlm 255). Norma resiprositas dalam hubungan ini di dalam masyarakat tradisional dijadikan sebagai landasan struktur persahabatan dan persekutuan. Bentuk hubungan timbal balik antara patron dan klien yang seimbang akan menimbulkan perasaan-perasaan terima kasih dan legitimasi, sedangkan pertukaran yang tidak seimbang dan hanya menguntungkan patron akan menimbulkan kemarahan moral dan menciptakan ketidakadilan. Secara tidak tertulis juga, seorang klien yang berlindung di bawah kuasa patron-nya harus memberikan timbal-balik atas apa yang telah diberikan oleh patron. Timbal-balik ini menurut Scott biasanya berupa tenaga, menjadi anak buahnya yang setia dan selalu siap melakukan apa saja yang diperintahkan oleh patron kepadanya.

Perlu ditekankan disini bahwa unsur pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Ketika kandidat atau pasangan calon mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk respon balik yang akan diberikan oleh pemilih. Hal tersebut sebenarnya menjadi salah satu masalah utama dalam politik patronase (Aspinall dan Sukmajati, 2015:22). Pada pemilu yang bebas rahasia, para pasangan calon pembeli suara biasanya tidak mempunyai jaminan bahwa pemilih yang menerima pemberiannya akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihan (Schaffer dan Schedler, 2008:19). Pemilih akan melihat keuntungan yang mereka peroleh dengan beragam cara. Beberapa pemilih mungkin berpikiran bahwa mereka terikat kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada si pemberi. Beberapa lainnya menganggap hal itu sebagai pemberian yang tidak mengikat,

sedangkan yang lainnya justru merasa tersinggung. Salah satu upaya dari para kandidat untuk mengatasi masalah ketidakpastian tersebut adalah dengan melakukan patronase dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kultural. Para pasangan bakal calon juga berusaha membangun relasi klientelistik dengan para penerima keuntungan dari politik patronase tersebut secara langsung atau melalui bantuan perantara (broker) yang dapat dipercaya dan yang telah memiliki relasi personal cukup dekat dengan pemilih (Aspinall dan Sukmajati, 2015:23).

Terdapat beberapa bentuk dan variasi patronase politik, antara lain: pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*) dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*). *Pertama*, pembelian suara (*vote buying*) yaitu distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu disertai dengan harapan yang implisit bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya untuk si pemberi (Aspinall dan Sukmajati, 2015:24). *Kedua*, pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih (Aspinall dan Sukmajati, 2015:25). *Ketiga*, pelayanan dan aktivitas (*services dan activities*), kandidat seringkali menyediakan atau membiayai berbagai aktivitas dan pelayanan untuk pemilih (Aspinall dan Sukmajati, 2015:26). *Keempat*, barang-barang kelompok (*club goods*). Istilah *club goods* merupakan praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu daripada untuk kepentingan individual. Sebagian besar *club goods* di Indonesia bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, perdesaan, atau lingkungan lain (Aspinall dan Sukmajati, 2015:27). *Kelima*, proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 28).

Dari berbagai macam variasi dan bentuk patronase di atas, fokus politik uang didalam penelitian ini yang digunakan hanya berkaitan dengan pembelian suara (*vote buying*) karena peneliti mempunyai asumsi bahwa *vote buying*

merupakan hal yang sering dan mudah dilakukan dalam melakukan praktik politik uang, dan masyarakat juga lebih nyata dalam menerimanya.

B. Kelas Menengah

Sistem pelapisan masyarakat dalam Sosiologi dikenal dengan istilah *social stratification* (stratifikasi sosial). Kata “*stratification*” berasal dari stratum (jamaknya strata yang berarti lapisan atau yang biasa disebut dengan kelas sosial). Istilah kelas juga tidak selalu mempunyai arti yang sama, walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan-kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Penjumlahan kelas-kelas dalam masyarakat disebut *class system* (Soekanto, 1987:260). Artinya, semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukan mereka itu diketahui dan diakui oleh masyarakat umum.

Sorokin (1959) mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan anggota masyarakat dalam kelas-kelas yang bersifat hierarkis, yang wujudnya adalah adanya orang-orang yang menduduki kelas yang tinggi dan kelas yang rendah. Untuk menentukan posisi seseorang dalam ruang sosial maka perlu pendefinisian tentang hubungan fenomena sosial dengan orang lain yang dipilih sebagai titik referensi (Pattinasarany, 2016:21). Sorokin juga berpendapat bahwa dasar dan inti lapisan masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan atau ketidaksamaan dalam pembagian hak, kewajiban, tanggung jawab, nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota-anggota masyarakat (Pandjaitan dan Prosodjo, 2015:176).

Dalam setiap perubahan sosial, kelas menengah memainkan peran sebagai aktor utama. Meskipun secara definitif “kelas menengah” terus diperdebatkan, tetapi setidaknya terdapat karakter khas yang bisa dipahami oleh publik luas, bahwa kelas menengah selalu diisi oleh kelompok tertentu yang kemudian menetapkan arah perubahan sosial-ekonomi, bahkan budaya suatu masyarakat. Kelas menengah keseluruhannya menunjukkan ideologi yang beragam karena berasal dari banyak aliran sejarah. Terutama di Indonesia sebagai negara besar dan beragam, aliran kelas menengah saling berkontestasi, sehingga kondisi kehidupan sosial-politik-ekonomi-budaya dapat berubah sewaktu-waktu, baik lambat maupun cepat. Hal itu disebabkan varian kelompok yang banyak, dan membawa perumusan landasan idiil yang beraneka ragam (Savran dan Idris, 2018:10).

Upaya mendefinisikan kelas menengah terus menerus dilakukan oleh berbagai kalangan lintas disiplin keilmuan, mencakup ekonomi, sosiologi, sejarah, politik, dan sebagainya. Sebagian besar dari akademisi bersepakat, bahwa upaya mendefinisikan kelas menengah harus ditarik dari serangkaian rentetan sejarah dan pengelompokan oleh para ahli dalam memaknai “kelas”. Kelas adalah salah satu istilah sentral dalam leksikon pemikiran sosial di barat, dan merupakan salah satu istilah yang mana makna yang dilekatkan padanya secara historis berhubungan erat dengan sejarah masyarakat. Hal itu dapat kita pahami, mengingat sejarah perkembangan masyarakat selalu ditopang oleh keberadaan kelompok-kelompok sosial yang stratifikatif, seperti antara tuan dan hamba, antara pemilik tanah dan pekerja, antara bos dan buruh, antara pejabat dan rakyat, dan sebagainya (Linklater, 2001:161).

Struktur kelas menengah yang memang sangat dinamis dan menjadi kelas yang paling berpengaruh dalam struktur kelas bangsa Indonesia. Namun demikian, studi yang mengkaji tentang kapitalisme, peran dan konsumerisme kelas menengah mandiri yang berfokus pada non radikal secara ekonomi dan non konservatif secara sosial dan budaya, lebih jauh yang dikaji dalam penelitian adalah kelas menengah ini menjadi agen perubahan dalam stratifikasi sosial dalam sebuah dominasi kelas elit menjadi kajian paling menarik, dan memiliki tantangan tersendiri terutama di perkotaan yang sedang mengalami industrialisasi. Kelas menengah yang baru di harapkan menjadi kelas menengah yang paling berpengaruh. Keberadaan kelas menengah menjadikan posisi tawar struktur kelas ini sulit di lacak dalam struktur kelas Bangsa Indonesia tapi peran mereka sangat penting, dan beberapa peristiwa perubahan mulai dari runtuhnya orde lama dan orde baru, serta orde baru ke orde reformasi menjadikan pelajaran bagi bangsa ini bahwa etnisitas dan peran mereka menjadikan kekuatan perubahan dalam sistem kenegaraan dan struktur sosial dalam masyarakat. Kesamaran sosok kelas menengah dalam struktur sosial di masyarakat menjadikan kelas menengah ini layak diteliti dan dipilih sebagai topik yang sampai saat ini membutuhkan kajian cukup banyak dan juga suatu imajinasi yang akan di perspektifkan dan proyeksikan dalam suatu objek empiris berangkat dari asumsi realitas dibangun dari objek material untuk diangkat menjadi asumsi preposisi yang lebih makro. Keberadaan yang samar kelas menengah bukan berarti tidak adanya struktur kelas menengah etnisitas mereka, munculnya peran kelas menengah menjadikan kekuatan

perubah dalam sebuah negara menjadikan peran mereka sangat sentral, klasifikasi dan penggolongan dalam sebuah struktur sosial dimasyarakat sangat samar, sehingga perlu studi yang sangat dalam studi yang fokus dan empirik tentang struktur kelas menengah ini (Heriyanto, 1999:3).

Studi dan perbincangan Kelas Menengah di Indonesia Sejak Tahun 1970an mengingatkan pada peran mereka yang sangat sentral dalam struktur kelas antara dari kelas elit dan kelas bawah. Karena era ini adalah era kelas menengah, pemahaman yang komprehensif tentang tindak tanduk kelompok ini amatlah penting, pertambahan jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah di Indonesia dianggap sebagian kalangan belum bermutu. Partisipasi kelas ini dalam pembangunan tidak saja diharapkan melalui kegiatan konsumsi yang menggerakkan perekonomian. Akan tetapi, lebih jauh dari itu juga diharapkan berperan sebagai agen perubahan. Penajaman konsep dalam sebuah teori tentang kelas menengah oleh Ariel Hariyanto dalam sebuah studi Robinson yang dimaksud dengan kelas menengah adalah beberapa pejabat pemerintahan, para praktisi, manajer dalam sebuah perusahaan dana, golongan terdidik atau intelektual, dalam struktur sosial yang ada di bangsa Indonesia. Kapitalisme disini seakan dibayangkan suatu tata produksi dalam penguasaan modal. Kebutuhan akan tingkat presisi dan pemetaan kapitalisme di bingkai dalam kepemilikan modal.

Kelas menengah di Indonesia mulai terdefiniskan ketika Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto memberikan banyak fasilitas dan tempat kepada mereka hal ini untuk menopang jalannya roda pembangunan negara. Kelompok kelas menengah ini terdiri dari para eksekutif muda yang bekerja di pusat kota atau para lulusan sarjana yang memiliki gaya hidup metropolitan (Robinson, 1999:17). Pada era Orde Lama, kelompok ini tidak banyak dibicarakan karena pada masa itu penuh dengan gejolak ideologi politik sedangkan pada era Soeharto mereka diberikan kemudahan posisi seperti menjadi tim penasehat pada pemerintahannya maupun dukungan fasilitas yang menunjang bagi kelompok ini seperti pembangunan kota lengkap dengan sarana prasarana yang bercirikan metropolitan dan global. Ruang gerak yang diberikan Orde Baru tersebut juga berupa pemberian lapangan kerja yang luas kepada para lulusan sarjana muda agar pertumbuhan perkotaan lebih maju dan dapat menjadi tolak ukur bagi daerah di Indonesia. Konsep pembangunan yang sentralistis di kota besar inilah yang

menyuburkan tumbuhnya kelas menengah perkotaan apalagi saat itu Indonesia mendapat keuntungan dari naiknya harga minyak dunia yang terkenal dengan periode *boom oil* pada tahun 1978.

Beberapa tulisan yang mengungkap tentang teori kelas menengah antara lain berasal dari tulisan Ariel Heryanto (1999:3) tentang “*Kelas Menengah Yang Majemuk*”. Dalam tulisannya, Heryanto cenderung mempertahankan teori dikotomi dua kelas yang terbentuk oleh kesenjangan penguasaan atas alat-alat produksi. Artinya, hanya ada dua kelas dalam satu tata produksi: kelas yang dikuasai dan kelas yang menguasai. Dalam pandangan masyarakat modern, dapat dikenali beberapa kelas atas dan beberapa kelas bawah, masing-masing berasal dari tata produksi yang berbeda. Dalam tulisan Juwono Sudarsono (1999:69) tentang “*Kelas Menengah dan Demokrasi Lapisan Menengah*”, Juwono menyebutkan bahwa kelas menengah sebagai penggerak demokratisasi hanya berlaku sampai akhir Abad ke 19. Kemajuan teknologi, perluasan perdagangan, berkembangnya industri pengangkutan dan jasa informasi telah lama meruntuhkan sendi-sendi teori perlunya kelas menengah. Kekuasaan baik yang bersumber dari harta, kepintaran otak maupun pemilikan atas tanah, bukannya semakin lebar, tetapi hanya dimiliki sekelompok orang saja.

Dalam kehidupan sosial menunjukkan perbedaan serta pengalaman pendidikan antara masyarakat yang berada di kelas menengah lebih tinggi tingkat pendidikan dan mempunyai persepsi bagus terhadap pendidikan. Sedangkan, masyarakat kelas bawah memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan mempunyai persepsi buruk terhadap pendidikan. Masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai kelas menengah adalah mereka yang hidupnya tidak miskin dan tidak juga kaya. Kebutuhan primer dan sekunder mereka terpenuhi dengan baik, dibandingkan dengan masyarakat yang berada di kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan sehari-hari itu sangat kesulitan. Mereka yang termasuk masyarakat kelas menengah biasanya terdiri dari: pejabat tinggi menengah, pengusaha menengah, guru, dosen, TNI dan pegawai negeri yang telah berkecukupan, guru sekolah, pekerja sosial, perawat, salesman, dan karyawan. Sedangkan, mereka yang termasuk kelas bawah terdiri dari: buruh tani, pekerja kasar, pedagang kecil, buruh harian lepas, pengangguran (Philipus dan Aini, 2004).

Sebuah studi yang dilakukan Bank Pembangunan Asia tentang pola konsumsi telah tumbuh dari 25% menjadi 43% dalam satu periode. Hal tersebut berarti mengalami pertumbuhan secara absolut dengan lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade yaitu dari 45 juta menjadi 93 orang (ADB 2010: 11-12). Angka-angka yang besar ini disebabkan oleh trik akuntansi ambang batas pengeluaran rumah tangga per kapita telah diturunkan menjadi sangat rendah yaitu US\$2 per hari. Dengan demikian, siapa saja yang tidak berada dalam kemiskinan absolut menjadi termasuk kelas menengah. Tetapi cara ini benar-benar menjelaskan tentang peningkatan dari jutaan orang miskin yang baru saja melewati garis kemiskinan karena pendapatan yang naik meskipun hanya sedikit. Kenaikan ini cukup merata antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sebuah survey yang dilakukan oleh Roy Morgan di Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 74% penduduk memiliki ponsel dan 81% tinggal dalam rumah tangga dengan memiliki sebuah sepeda motor. Rumah tangga “kelas menengah”, yang ditentukan berdasarkan kepemilikan yang simultan atas televisi, kulkas, dan entah sepeda motor atau mobil, membentuk 45% dari populasi, yang naik dari 29% pada dua tahun sebelumnya.

Studi etnografi mengenai kelas menengah yang dilakukan oleh Van Klinken yang berfokus pada pembentukan kelas menengah yang terdiri atas persoalan-persoalan yang lebih bersifat relasional dan politis. Kelas pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan tentang pendapatan atau kategori pengeluaran. Kelas merupakan sebuah konsep politik, yang dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa perbedaan tetap terjadi antara perilaku orang-orang kaya dan miskin terhadap hal-hal yang merupakan kebaikan bersama. Kelas menengah yang bertumbuh pesat di tingkat provinsi lebih menyukai proteksionisme ekonomi, menginginkan kekuasaan negara yang lebih dan bukan sebaliknya, dan mempraktikkan demokrasi patronase yang bercacat.

Kelas menghubungkan kepentingan materialis yang lebih atau kurang koheren dari sekelompok besar orang. Salah satu cara untuk mengenalinya adalah ketika para anggotanya bertindak secara politik dengan cara yang sama. Selama orde baru, terdapat skeptisisme yang relevan terhadap asumsi umum bahwa kelas menengah mendorong demokrasi. Asumsi tersebut hampir tidak berlaku selama orde baru ketika kelas menengah di Indonesia sedang bangkit.

Alih-alih terdorong oleh pola konsumsi, studi yang dilakukan oleh Van Klinken didorong untuk secara radikal memperluas gagasan tentang kelas menengah Indonesia oleh peristiwa-peristiwa politik selama dua puluh tahun terakhir. Setelah tahun 1998 menjadi jelas bahwa kekuatan politik elite yang mendominasi untuk desentralisasi ditengah-tengah semangat demokratisasi yang mengikutinya tidak berasal dari elite nasional, tetapi dari kelas menengah provinsi yang lebih luas. Sejak reformasi sebuah gelombang studi-studi yang baru tentang Indonesia kontemporer telah beralih fokus dari “wilayah puncak kekuasaan” ke wilayah tengah suatu negara (Van Klinken, 2014:3).

C. Pemaknaan

1. Makna Hidup

Menurut Victor E Frankl dalam buku *Naisaban* makna hidup adalah arti dari hidup bagi seorang manusia. Arti hidup yang dimaksudkan adalah arti hidup bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk direspon karena kita semua bertanggung jawab untuk suatu hidup. Respon yang diberikan bukan dalam bentuk kata-kata melainkan dalam bentuk tindakan (Naisaban, 2004:135). Makna hidup merupakan suatu motivasi, tujuan dan harapan yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup di dunia ini. Untuk mencapai semua itu seseorang harus melakukan sesuatu dalam hidupnya, tidak hanya diam dan bertanya hidup ini untuk apa. Semua yang diinginkan dalam hidupnya dapat dicapai dengan usaha yang maksimal.

Frankl terkenal dengan logo terapinya, secara teori logo terapi adalah teori yang berorientasi untuk menemukan arti, suatu arti dalam dan bagi eksistensi manusia. Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana berusaha menemukan dan bertanggung jawab terhadap arti atau nilai dibalik kehidupan (Naisaban, 2004:136). Frankl juga mengatakan bahwa kebermaknaan hidup disebut sebagai kualitas penghayatan individu terhadap seberapa besar ia dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi-potensi dan kapasitas yang dimilikinya dan seberapa jauh ia telah berhasil mencapai tujuan-tujuan hidupnya, dalam hal memberi makna atau arti kepada kehidupannya (Rochim, 2009:7).

Makna hidup merupakan sesuatu yang penting dan berharga bagi seseorang individu, apabila seorang berhasil menemukan makna hidup maka kehidupan ini akan dirasakan sangat berarti. Makna hidup merupakan hal yang sangat pribadi, sehingga dapat selalu berubah-ubah sering berjalannya waktu dan perubahan situasi dalam kehidupan individu tersebut. Menurut Kruger makna hidup adalah “manner”, suatu cara atau gaya yang digunakan untuk menghadapi kehidupan, untuk menunjukkan eksistensi, dan cara pendekatan individu terhadap kehidupannya sendiri berbeda-beda dan unik. Dan apabila individu telah mencapai tingkat kesadaran yang lebih diman kesadarannya lebih tertuju untuk pencarian makna-makna, maka dapat dipastikan bahwa pemaknaan seorang individu terhadap kehidupan dengan individu lain akan berbeda satu sama lain.

Menurut Schultz makna hidup adalah memberi suatu maksud bagi keberadaan seseorang dan memberi seseorang kepada suatu tujuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Menurutnya keberadaan seseorang (manusia) adalah bagaimana cara dalam menerima nasib dan keberaniannya dalam menahan penderitaan. Schultz juga menyatakan manusia dapat memkanai hidupnya dengan cara bekerja, karena dengan bekerja individu dapat merealisasikan dirinya dan mentransendenkan diri mereka (Oktavia, 2008:3).

Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Pengertian makna hidup menjelaskan bahwa didalam makna hidup juga terdapat tujuan hidup, memiliki keyakinan dan harapan bahwa ada hal-hal yang perlu didapatkan dan dipenuhi dalam kehidupan ini. Makna hidup tidak mudah ditemukan dalam kehidupan seorang individu, akan tetapi makna hidup benar-benar ada dalam kehidupan. Apabila makna hidup berhasil ditemukan dalam kehidupan, maka kehidupan akan terasa lebih berarti dan berharga yang dapat melahirkan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan sebuah reward dari tercapainya makna hidup seseorang. Makna hidup adalah motivasi, tujuan dan harapan yang ada pada kehidupan setiap orang yang sangat bersifat personal dan dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami seseorang yang harus dicapai dengan segala usaha dan tanggung

jawabdan dapat membuat hidup bahagia dan lebih berarti. Dari pengertian makna hidup tersebut dapat disimpulkan bahwa makna hidup adalah hal-hal yang dianggap penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (Bastaman, 2007:43).

2. Metode Menemukan Makna Hidup

Makna hidup selalu terdapat dalam setiap kehidupan itu sendiri, makna hidup harus dicari dan ditentukan oleh individu tersebut. Ini disebabkan karena makna hidup itu tersembunyi dalam kehidupan. Ada lima langkah untuk menemukan makna hidup. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Pribadi

Langkah pertama ini membantu individu memperluas dan memahami beberapa aspek kepribadian serta corak kehidupan. Pada langkah awal, individu harus mengenali kelemahan-kelemahan diri dan berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. Setelah itu, individu memutuskan energi untuk meningkatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dan mengoptimalkan potensi diri, sehingga mampu mencapai kesuksesan. Dengan mengenai dan memahami berbagai aspek dalam kehidupan, maka individu akan lebih mampu menyesuaikan diri ketika menghadapi masalah-masalah, baik yang berhubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain.

b. Bertindak Positif

Tindakan-tindakan positif ini jika dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan yang efektif. Untuk menerapkan metode bertindak positif ini perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Pilih tindakan-tindakan nyata yang benar-benar dapat dilaksanakan secara wajar tanpa perlu memaksakan diri.
- 2) Perhatikan reaksi-reaksi spontan dari lingkungan terhadap usaha untuk bertindak positif.
- 3) Besar kemungkinan bahwa usaha bertindak positif mula-mula dirasa sebagai tindakan pura-pura dan bersandiwara oleh individu bersangkutan, tetapi jika dilakukan secara konsisten akan menyatu dengan diri menjadi bagian dari kepribadian.

Terdapat dua jenis tindakan positif ke dalam diri dan tindakan positif ke luar diri. Tindakan positif ke dalam diri bertujuan untuk mengembangkan diri sendiri, menumbuhkan energi positif, ketrampilan dan keahlian yang maksimal. Sedangkan tindakan positif ke luar diri berarti melakukan sesuatu yang berharga untuk orang lain, membuat orang lain merasa senang dan menghindari perbuatan yang menyakiti. Metode bertindak ini didasari pemikiran bahwa dengan cara membiasakan diri melakukan tindakan-tindakan positif, maka individu akan memperoleh dampak positif dalam perkembangan pribadi dan kehidupan sosialnya.

c. Pengakraban Hubungan

Terdapat dua jenis tindakan positif ke dalam diri dan tindakan positif ke luar diri. Tindakan positif ke dalam diri bertujuan untuk mengembangkan diri sendiri, menumbuhkan energi positif, ketrampilan dan keahlian yang maksimal. Sedangkan tindakan positif ke luar diri berarti melakukan sesuatu yang berharga untuk orang lain, membuat orang lain merasa senang dan menghindari perbuatan yang menyakiti. Metode bertindak ini didasari pemikiran bahwa dengan cara membiasakan diri melakukan tindakan-tindakan positif, maka individu akan memperoleh dampak positif dalam perkembangan pribadi dan kehidupan sosialnya.

d. Pendalaman Tiga Nilai

Frankl mengemukakan tiga pendekatan yang merupakan sumber makna hidup, yang apabila diterapkan dan dipenuhi maka seorang itu akan menemukan makna hidupnya. Ketiga pendekatan itu adalah nilai kreatif, nilai penghayatan dan nilai bersikap. Penjelasan dari ketiga nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1) Nilai-nilai Kreatif

Nilai ini dapat diraih oleh setiap individu melalui berbagai kegiatan, individu dapat mengemukakan makna hidupnya dengan bertindak. Misalnya bekerja, akan tetapi makna hidup bukan terletak pada pekerjaan melainkan pada sikap dan cara kerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi pada pekerjaannya. Berbuat kebajikan dan melakukan hal-hal

yang bermanfaat bagi lingkungan termasuk usaha merealisasikan nilai-nilai kreatif.

2) Nilai Penghayatan

Nilai penghayatan adalah mengenai penerimaan individu terhadap dunia. Nilai penghayatan dapat diraih dengan cara menerima apa yang ada dengan penuh pemaknaan dan penghayatan yang mendalam. Seperti penghayatan terhadap keindahan, penghayatan terhadap rasa cinta dan memahami suatu kebenaran. Dalam hal ini cinta kasih merupakan nilai yang sangat penting dalam mengembangkan hidup bermakna.

3) Nilai-Nilai Bersikap

Nilai ini dianggap penting dan paling tinggi dari nilai-nilai yang lain, dimana individu dapat mengambil sikap yang tepat terhadap keadaan yang tidak bisa dihindari. Kehidupan tidak hanya mempertinggi derajat dan memperkaya pengalaman, akan tetapi juga ada peristiwa-peristiwa yang hadir dalam kehidupan seseorang yang tidak dapat dihindarinya. Nilai ini menekankan bahwa penderitaan yang di alami oleh seseorang masih tetap dapat memberikan makna bagi dirinya jika disikapi dengan tepat (Bastaman, 1995:195).

e. Ibadah

Dengan pendekatan kepada Tuhan, individu akan menemukan berbagai makna hidup yang dibutuhkan. Dengan beribadah, individu akan mendapatkan kedamaian, ketenangan dan pemenuhan harapan. Karena individu juga perlu mengembangkan kebermaknaan spiritual sehingga dapat memperoleh makna yang lebih mendalam dalam hidup.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Makna Hidup

Ciri-ciri yang dikemukakan Frankl mengenai individu sehat, yaitu individu yang dapat menemukan kebermaknaan hidupnya melalui realisasi nilai-nilai manusiawi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi makna hidup menurut Frankl adalah:

- a. Spiritualitas, merupakan sebuah konsep yang sulit untuk dirumuskan. Spiritual dapat disinonimkan dengan istilah jiwa, hidup akan menjadi penuh makna dan keagungan ketika individu dapat menjadi inspirasi dan jalan bagi orang lain untuk menemukan panggilan jiwa mereka

- b. Kebebasan, manusia dianugrahi kebebasan dan dengan kebebasan tersebut diharuskan untuk memilih bagaimana hidup dan bertingkah laku yang sehat secara psikologis
- c. Tanggung jawab, individu yang sehat secara psikologis menyadari sepenuhnya akan beban dan tanggung jawab yang harus mereka pikul dalam fase kehidupannya, sekaligus menggunakan waktu yang mereka miliki dengan bijaksana agar hidup dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Kehidupan yang penuh arti sangat ditentukan oleh kualitasnya, bukan berapa lama atau beberapa panjang usia hidup. Tanggung jawab yang harus dipikul manusia berasal dari berbagai macam aspek kehidupan, baik dari lingkungan sosial, adat budaya dan agama. Manusia harus bertanggung jawab atas makna dari sebuah kehidupan yang dijalannya.

BAB III

KELURAHAN KASEPUHAN SEBAGAI SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Demografi

a. Jumlah penduduk

Penduduk Kelurahan Kasepuhan Kabupaten Batang, Jawa Tengah berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tahun 2018 tercatat sebanyak 16084 jiwa. Dengan rincian jumlah laki-laki tercatat 6179 jiwa, jumlah perempuan tercatat 7905 jiwa, jumlah kepala keluarga tercatat 5037 KK dan kepadatan penduduk 3.184,95 per KM.

TABEL 1

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA

No	Usia/tahun	Laki-laki	Perempuan
1	0-12 bulan	0	0
2	1-4	487	463
3	5-9	669	629
4	10-14	572	588
5	15-19	638	618
6	20-24	613	560
7	25-29	802	705
8	30-34	731	706
9	35-39	778	760
10	40-44	632	599
11	45-49	564	540
12	50-54	486	472
13	55-59	386	394
13	60-64	304	303
14	65-69	252	222
15	70-74	122	133
16	>75	183	235

17	Total	6073	7798
----	-------	------	------

Sumber: *Profil Desa Kasepuhan tahun 2018*

Persentase rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah prioritas penambahan penduduk rata-rata tiap tahun. Pertumbuhan penduduk wilayah perencanaan dihasilkan oleh berubahnya jumlah secara alamiah yaitu kelahiran dan kematian serta perubahan jumlah penduduk akibat migrasi (penduduk datang dan pergi) (Landola, 2009). Melihat Kelurahan Kasepuhan dalam angka 2018 jumlah penduduk laki-laki berjumlah 6073 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2018 berjumlah 7798 jiwa.

b. Tingkat pendidikan Kelurahan Kasepuhan

Kelurahan Kasepuhan merupakan desa yang pendidikannya sudah maju, dilihat dari data yang diperoleh, pada usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah berjumlah 178 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk 16.716 jiwa pada tahun 2018. Artinya dari sisa penduduk yang tidak pernah sekolah pernah merasakan bangku sekolah dan minimal tidak buta huruf. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Kasepuhan:

TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT
KELURAHAN KASEPUHAN

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	1058	1003
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	306	315
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	688	685
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	728	719
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	91	87
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	117	87
7	Tamat SD/ sederajat	2626	2604
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	2014	2054
9	Usia 18-56 tahun tidak tamat	93	97

	SLTA		
10	Tamat SMP/Sederajat	231	221
11	Tamat SMA/Sederajat	161	101
12	Tamat D-1/Sederajat	0	0
13	Tamat D-2/Sederajat	18	10
14	Tamat D-3/Sederajat	6	13
15	Tamat S-1/Sederajat	325	237
16	Tamat S-2/Sederajat	11	8
17	Tamat S-3/Sederajat	1	1
Jumlah total		16.716	

Sumber: *Profil Desa Kasepuhan tahun 2018*

Tabel di atas menunjukkan mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Kasepuhan. Melihat dari tabel di atas, sampai pada tahun 2018 ada beberapa orang yang di kategorikan masih dalam usia muda tidak pernah merasakan bangku sekolah. Dalam tabel ditunjukkan usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah berjumlah 1373 jiwa dengan rincian, laki-laki 688 orang dan perempuan 685 orang. Sedangkan masyarakat yang sekolah dengan lulusan SD/ sederajat berjumlah 5230 dengan rincian laki-laki 2626 dan perempuan 2604. Jika melihat dengan jenjang yang lebih tinggi seperti lulusan D3, S1 dan S2 berjumlah 600 dengan rincian laki-laki 342 dan perempuan 258. Dalam hal pendidikan laki-laki selalu lebih banyak dari pada laki-laki. Kecuali pada jenjang D3. Dari tabel dan data yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kasepuhan pendidikannya sudah maju.

c. Jenis Mata Pencaharian Kelurahan Kasepuhan

Mata pencaharian/pekerjaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada setiap orang untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Masyarakat Kelurahan Kasepuhan merupakan masyarakat yang majemuk, dimana masyarakatnya memiliki jenis pekerjaan yang beraneka ragam. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jenis mata pencaharian Desa Kasepuhan:

TABEL 3
JENIS MATA PENCAHARIAN KELURAHAN KASEPUHAN

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Belum/tidak bekerja	2108	2132	4240
2	Mengurus rumah tangga	6	1585	1591
3	Pelajar/mahasiswa	1222	1116	2338
4	Pensiunan	40	27	67
5	Pegawai Negeri Sipil	137	70	207
6	Tentara Nasional Indonesia	22	0	22
7	Kepolisian RI	25	4	29
8	Perdagangan	57	106	163
9	Petani/pekebun	198	182	380
10	Peternak	1	0	1
11	Nelayan/perikanan	393	2	395
12	Industri	47	55	102
13	Konstruksi	42	0	42
14	Transportasi	25	0	25
15	Karyawan Swasta	548	460	1008
16	Karyawan BUMN	13	7	20
17	Karyawan BUMD	4	2	6
18	Karyawan Honoror	24	14	38
19	Buruh harian lepas	1839	1245	3084
20	Buruh tani/perkebunan	8	3	11
21	Buruh nelayan/perikanan	3	0	3
22	Tukang batu	3	0	3
23	Tukang kayu	7	0	7
24	Tukang jahit	1	1	2
25	Penata rias	0	1	1
26	Mekanik	2	0	2
27	Seniman	1	0	1
28	Dosen	2	3	5

29	Guru	48	78	126
30	Pengacara	3	0	3
31	Notaris	0	2	1
32	Dokter	1	0	1
33	Bidan	0	19	19
34	Perawat	3	13	16
35	Psikiater/psikolog	0	1	1
36	Pelaut	34	0	34
37	Sopir	36	0	36
38	Pedagang	138	254	392
39	Perangkat desa	6	0	6
40	Wiraswasta	1137	531	1668
41	Lainnya	2	0	2
Total		8186	7913	16099

Sumber: *Profil Desa Kasepuhan tahun 2018*

Dengan mata pencaharian yang berbeda-beda seperti pada tabel di atas masyarakat Kelurahan Kasepuhan mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas yang berjumlah 3084 dengan jumlah buruh laki-laki 1839 dan jumlah buruh perempuan 1245 orang. Mata pencaharian sebagai wiraswasta berjumlah 1668 dengan jumlah laki-laki sebanyak 1137 dan perempuan sebanyak 531 orang. Warga yang bekerja sebagai petani/pekebun berjumlah 380 dan nelayan sejumlah 395. Presentasi tertinggi di Kasepuhan yaitu belum/tidak bekerja sebanyak 4240 orang yang merupakan bayi dan lanjut usia.

2. Kondisi Sosial dan Politik Masyarakat Kelurahan Kasepuhan

a. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Kasepuhan

Kondisi sosial masyarakat Kasepuhan dapat ditinjau dari beberapa konsep, antara lain budaya, antropologi dan sejarah. Pertama kondisi masyarakat di Kelurahan Kasepuhan apabila ditinjau dari konsep budaya, masyarakat Kelurahan Kasepuhan umumnya masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan, gotong royong dan kebersamaan. Rasa solidaritas antara anggota masyarakat Batang sangat kuat terutama antar warga RW satu dengan RW lainnya. Contohnya jika pada saat ada hajatan, mereka semua ikhlas membantu

memeriahkan hajatan tersebut dan dalam membuat tempat ibadah mereka seringkali mengusung konsep kerja bakti dan bahkan beramai-ramai memberikan bantuan berupa materi untuk modal pembangunannya. Walaupun disamping itu di Kelurahan Kasepuhan sebagian kecil masih ada persaingan (*competition*) namun bukan persaingan yang menimbulkan pertikaian (fisik). Hal yang sangat manusiawi yang sering terjadi tidak hanya di masyarakat Kelurahan Kasepuhan, seperti keinginan untuk mendapatkan dan memiliki sesuatu seperti apa yang tetangganya dapatkan, bahkan cenderung ingin mengungguli (sikap iri hati).

Kondisi sosial kedua dilihat dari konsep antropologi. Masyarakat Kelurahan Kasepuhan pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat. Pola hidup juga masih dipengaruhi tradisi yang sangat kental dan masih memegang teguh budaya daerah sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan asli daerahnya yang menjadi bagian dari kekayaan kebudayaan nusantara. Adapun beberapa tradisi yang ada di Kelurahan Kasepuhan antara lain:

1) Kirab Pusaka

Kirab pusaka merupakan suatu kegiatan rutin setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, juga merupakan perayaan menyambut hari jadi Pemerintahan Kabupaten Batang dan sering kali dimaknai sebagai ritual tolak bala.

2) Kliwonan

Kliwonan adalah salah satu budaya tradisional asli warga masyarakat Batang, begitu juga Kelurahan Kasepuhan yang turut serta dalam kegiatan yang diadakan pada setiap malam Jum'at Kliwon yang bertempat di alun-alun Batang, Jawa Tengah. Tradisi ini juga diikuti oleh warga dari luar Batang seperti Bandung, Cirebon, Tegal, Pemalang, Kudus, dan Salatiga. Bahkan ada beberapa pengunjung ada yang mengaku berasal dari Lamongan dan Bojonegoro, Jawa Timur, yang sengaja datang untuk berdagang di lokasi Kliwonan, karena ada mitos dagangannya akan semakin laris setelah kembali ke tempat asalnya jika sebelumnya sudah dibawa di Kliwonan. Masyarakat Batang melakukan tradisi Kliwonan dalam rangka untuk mengenang pendahulu mereka yaitu Bahurekso yang telah memabad atau membuka daerah Batang.

3) Lomban (Lomba Dayung)

Lomba dayung merupakan tradisi tahunan yang diselenggarakan pada H+1 Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Tradisi ini diselenggarakan oleh masyarakat Klidang Lor Kecamatan Batang yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Dari kegiatan ini mempunyai maksud sebagai budaya tradisi nelayan dan terjalinnya tali silaturahmi serta melestarikan “Budaya Bahari”. Sudah menjadi rahasia umum, biasanya peserta atau team lomba dayung ini disamping kekuatan fisik yang dimiliki, namun juga non fisik atau mistik, sering kali juga terlihat sang dukun ikut bersama naik diatas perahu.

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Kasepuhan yang ketiga dapat ditinjau dari konsep sejarah. Asal usul Kelurahan Kasepuhan diambil dari kata *sesepuh* yang artinya ‘paling tua’. Desa Kasepuhan yang terletak di Kecamatan Batang juga masih ada kaitannya dengan Keraton Kasepuhan Cirebon. Dukuh-dukuhnya juga memiliki nama yang sama dengan keraton Kasepuhan Cirebon.

Keraton Kasepuhan didirikan pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Mochammad Arifin II (cicit dari Sunan Gunung Jati) yang menggantikan tahta dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1506. Ia bersemayam di dalam Agung Pakungwati Cirebon. Keraton Kasepuhan dulunya bernama Keraton Pakungwati, sedangkan Pangeran Mas Mochammad Arifin bergelar Panembahan Pakungwati I. Sebutan Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1549 dalam Mesjid Agung Sang Cipta Rasa dalam usia yang sangat tua. Nama beliau diabadikan dan dimuliakan oleh nasab Sunan Gunung Jati sebagai nama keraton yaitu Keraton Pakungwati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan (Sjamsuddin, 1993: 59).

Masuknya Islam di Kabupaten Batang dan sekitarnya yang dibawa oleh Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi berasal dari Maghrib, Maroko. Syekh Maulana Maghribi menyebarkan Islam dengan kedua santrinya yang bernama Mbah Ngalimun dan Mbah Prawoto sedang Syekh Maulana Maghribi yang disitu bernama Syekh Maulana Isro' Al Ra'uf yang berjalan dari Ujung Negoro.

Di daerah tersebut, agama Islam kurang berkembang dengan penuh kesabaran ia tetap menyebarkan Agama Islam dan selalu meminta keridho'an Allah hingga tempat itu menjadi sebuah petilasan. Beliau meneruskan perjalanan

menuju ke Selatan melihat daratan yang sering kemasukan air rob atau bahasa Jawa Kebanyon (Klebon Banyu) Desa sekitar itu dinamakan Kebanyon dan ditumbuhi tumbuhan Teratai maka desa itu disebut desa Teratai /Terate /Nerate/Nrate ia juga dikenal dengan Kyai Atas Angin sebutan orang Jawa pada waktu itu menyebut negara jazirah Arab dengan Sebutan Negri Atas Angin Ia pun selalu berpindah-pindah dalam penyebaran Agama Islam, hingga tempat yang dimana ia menetap sering dijadikan makam Petilasan (mBatang.com 25/02/2001).

b. Kondisi Politik Masyarakat Desa Kasepuhan

Kondisi politik suatu masyarakat dalam satu daerah pada umumnya dapat dilihat dari banyak sektor. Diantaranya melalui sektor ekonomi yang berarti membandingkan tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita penduduk. Hal ini menjadi ukuran tingkat partisipasi politik masyarakat, artinya apabila jumlah kemiskinan lebih tinggi dalam suatu masyarakat, maka bisa terjadi situasi politik yang memaksa masyarakat untuk terikat pada satu kondisi politik. Sebagai contoh dalam pilkada daerah apabila jumlah kemiskinan mencapai angka yang besar bisa dimanfaatkan sebagai lumbung suara salah satu calon dengan melakukan kecurangan politik dengan politik uang atau sejenisnya. Dari data yang diperoleh terakhir dari data yang ada, Kelurahan Kasepuhan memiliki 6 dukuh, 6 RW, dan 44 RT.

Partisipasi politik adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain (Thoha, 2005:343). Tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Kasepuhan dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

TABEL 4
TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
KELURAHAN KASEPUHAN

No	Jenis Pemilihan	Laki-laki		Perempuan	
		Yang memiliki hak pilih	Yang memilih	Yang memiliki hak pilih	Yang memilih
1	Pemilu Kepala Kabupaten	5224	4113	5164	4201
2	Pemilu Kepala	5187	2591	5179	3536

	Gubernur				
3	Pemilu Legislatif (DPD/DPR/DPRD)	5255	4041	5206	4535
4	Pemilu Presiden	5395	0	5395	0

Sumber: *Profil Desa Kasepuhan tahun 2018*

Dari Tabel di atas menunjukkan mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Kasepuhan. Melihat dari tabel di atas, sampai pada tahun 2018 jumlah pemilih perempuan lebih besar dalam menggunakan hak pilihnya daripada pemilih laki-laki. Pada pemilu kepala kabupaten, jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 4201 dari 5164 yang memiliki hak pilih, sedangkan pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 4113 dari 5224 yang memiliki hak pilih.

B. Dinamika Pilkada 2017 di kelurahan Kasepuhan

Pilkada 2017 menjadi ajang pemilihan pemimpin baru bagi masyarakat Kabupaten Batang, khususnya warga Kelurahan Kasepuhan, karena dalam proses tersebut warga bisa mnyalurkan pilihan mereka secara langsung. Pilkada Kabupaten Batang 2017 diikuti oleh empat kandidat, yaitu kandidat nomor 1 pasangan Wihaji-Suyono, kandidat nomor 2 pasangan Lafran-Urip, kandidat nomor urut 3 pasangan Burhan-Ariani, dan kandidat nomor urut 4 pasangan Faizin-Erna.

Masing-masing kandidat diusung oleh beberapa partai yaitu sebagai berikut:

1. Wihaji- Suyono diusung oleh Golkar dan PPP
2. Lafran-Urip diusung oleh PDIP dan GERINDRA
3. Burhan-Ariani diusung oleh PKB dan Nasdem
4. Faizin-Erna diusung oleh PAN, PKS dan DEMOKRAT

Hasil kemenangan pilkada dimenangkan oleh pasangan Wihaji-Suyono dengan perolehan suara sebanyak 56.61%, disusul oleh pasangan Lafran-Urip yang memperoleh suara sebanyak 26.94%, kemudian diurutkan selanjutnya yaitu pasangan Burhan-Ariani yang memperoleh suara sebanyak 14.59%, dan pasangan Faizin-Erna memperoleh suara sebanyak 1.87% (KPU Kab.Batang, 2017).

Dari data di atas dapat disimpulkan dalam skema sebagai berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Batang 2017

No	Kandidat	Partai yang Mengusung	Hasil Hitung TPS
1	Wihaji- Suyono	Golkar dan PPP	56.61%
2	Lafran-Urip	PDIP dan GERINDRA	26.94%
3	Burhan-Ariani	PKB dan Nasdem	14.59%
4	Faizin-Erna	PAN, PKS dan DEMOKRAT	1.87%

Sumber: *Analisis Primer*

Kelurahan Kasepuhan merupakan salah satu wilayah di bawah kandidat nomor urut 3, yaitu Burhan-Ariani yang merupakan kandidat dengan beberapa tim suksesnya tinggal di Kasepuhan. Koordinator lapangan dan broker di Kasepuhan juga merupakan anggota tim sukses dari bupati sebelumnya.

Pilkada di Kelurahan Kasepuhan di dominasi oleh dua kandidat, yaitu kandidat nomor urut 1 Wihaji-Suyono dan kandidat nomor urut 3 Burhan-Ariani. Maksud didominasi di atas adalah dalam pelaksanaan kampanye dan sosialisasi kandidat mereka lebih aktif dibandingkan dengan dua kandidat yang lain, karena biasanya setiap kandidat masing-masing memiliki daerah yang menjadi target kampanye.

Proses pelaksanaan pilkada di Kasepuhan tentunya terdapat beberapa hal selama masa kampanye sampai menjelang pilkada. Salah satunya yaitu praktik politik uang yang masih berjalan di Kasepuhan sewaktu Pilkada 2017. Dalam proses pencalonan, dua kandidat yang mendominasi wilayah Kasepuhan saling bersaing untuk mendapatkan suara warga, diantaranya yaitu dengan memberikan uang untuk memperoleh suara (*vote buying*).

Strategi yang digunakan dalam pendistribusian uang masing-masing kandidat berbeda. Kandidat nomor urut 1 mendistribusikan uang dengan cara pembentukan timses per daerah hingga tingkat RT dengan melalui stiker yang dipasang di rumah warga. Cara kandidat nomor urut 3 dalam pembagian uang yaitu melalui broker yang sudah ditunjuk untuk merekap data warga kemudian baru diberi uang ketika pagi hari sebelum pencoblosan.

Jumlah nominal yang diberikan masing-masing kandidat berbeda. Kandidat nomor urut 1 memberikan uang sebanyak Rp. 70.000 dan kandidat nomor 3 memberikan uang sebanyak 30.000. Salah satu timses kandidat nomor 3 di Kasepuhan mengaku bahwa dia hanya mendapatkan Rp. 3.000.000 untuk penyebaran uang di Kasepuhan. Oleh karena itu, warga hanya mendapatkan Rp 30.000 dan itu tidak semua warga yang didata mendapatkan uang. Warga yang tidak mendapatkan uang merasa kecewa, karena mereka sudah memberikan data kepada broker untuk dicatat menjadi pemilih kandidat nomor 3 dengan menjanjikan uang, namun mereka tidak memperoleh uang yang dimaksud oleh broker.

Cara penyebaran uang yang dilakukan timses kandidat nomor urut 1 yaitu dengan memperkirakan jumlah nominal yang akan dikeluarkan kandidaat lain, dan melihat wilayah yang akan ditargetkan. Jika wilayah yang berada di kota, mereka memberikan uang sebanyak Rp. 70.000, karena mereka menganggap bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah kota akan lebih banyak menerima uang dari kandidat lain. Sedangkan untuk wilayah di kabupaten dan perdesaan, timses kandidat nomor 1 memberikan uang sebanyak Rp. 30.000, karena menurut timses kandidat nomor 1 menganggap warga desa masih menganggap uang dengan jumlah tersebut masih bernilai tinggi.

BAB IV

PRAKTIK POLITIK UANG DAN PEMAKNAANNYA

A. Pengalaman Kelas Menengah dalam Proses Politik di Batang terkait Politik Uang

Politik uang merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Kumolo, 2015: 155). Dapat diartikan juga sebagai semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Dalam penelitian ini, jenis politik uang yang akan penulis kaji yaitu tentang pembelian suara (*vote buying*). Pembelian suara (*vote buying*) merupakan pemberian imbalan materi kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya.

Praktik politik uang di Indonesia sudah merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak menyadari terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-praktik politik uang ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena tidak merasa bahwa politik uang secara normatif harus di jauhi. Sehingga semua itu berjalan seperti suatu hal yang wajar. Kendati jelas terjadi politik uang, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes (Rusham, 2015:85).

Selama proses wawancara, penulis menemukan data adanya praktik politik uang berupa pembelian suara (*vote buying*) pada pilkada 2017 di Desa Kasepuhan. Dari beragam data mengenai adanya politik uang berupa pembelian suara (*vote buying*), penulis memetakan menjadi tiga bentuk dalam proses pendistribusian politik uang, yaitu (1) Pendataan warga dengan mengumpulkan

NIK dan nomor KK yang dilakukan oleh broker, (2) pemasangan stiker di rumah warga, dan (3) proses pemberian uang kepada warga Desa Kasepuhan:

1. Datangnya Broker ke Rumah Warga untuk meminta Data

Berkaitan dengan politik uang, ada keragaman informasi tentang fenomena politik uang itu. Informan pertama yang penulis temui bernama Bapak Agus¹. Bapak Agus menyampaikan bahwa:

“Kalau masa pilkada mesti ada uangnya mbak. Wong semua calon itu pasti ngasih. Sudah hal yang wajar kalo pas pilkada itu ada uang yang diberikan. Makanya masyarakat ga ngerasa kalo itu hal yang salah. Soalnya disini sudah biasa hal seperti itu, kalo ga ada uang malah jadi omongan warga.” (wawancara 06 April 2019).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Adam bahwa:

“Politik uang masih ada ketika pilkada. Jika hal itu (politik uang) ingin dihilangkan sangat susah, karena pilkada dengan politik uang biasanya saling berkaitan disini. Sedikit banyak uang yang diberikan masyarakat justru menantikan hal itu (diberi uang) dari para calon kandidat.” (wawancara 06 April 2019).

Informasi lain tentang politik uang yang disampaikan oleh Ibu Ika bahwa:

“Uang masih berjalan di Desa Kasepuhan menjelang pemilu, meskipun penyebarannya tidak merata (karena setiap calon kandidat mempunyai daerah wilayah tujuannya masing-masing). Warga biasanya menyetorkan nomor KK dan NIK serta nomor telepon kepada tim sukses atau koordinator desa setempat untuk didata dan mendapatkan uang (wawancara 05 April 2019).

Dalam mekanisme pemberian uang, terdapat beberapa syarat yang harus dikumpulkan sebagai data untuk menjadi tanda bahwa warga akan memilih sesuai yang memberikan mereka uang. Data tersebut berupa NIK dan NKK yang dikumpulkan kepada tim sukses.

Informan lain bernama Mbak Fitri mengatakan bahwa:

“Politik uang masih ada, dan biasanya setiap rumah mendapatkan satu amplop dari salah satu calon kandidat, dengan syarat mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) untuk didata sebagai pemilih yang akan mendukung calon kandidat yang telah memberi uang.” (wawancara 05 April 2019).

Penulis juga menemui salah seorang yang berperan sebagai broker² di Desa Kasepuhan bernama Ibu Siti. Ibu Siti merupakan broker dari salah satu kandidat

¹ Nama-nama dalam penelitian ini bukan nama yang sebenarnya.

pada pilkada 2017 yang memiliki cukup pengaruh di wilayahnya. Hasil wawancara dari Ibu Siti yaitu sebagai berikut:

“Saya jadi tim suksesnya Pak Burhan (calon kandidat nomor 3) soalnya dulu jadi tim suksesnya Pak Yoyok (bupati sebelumnya). Saya ga kenal calon lain kecuali Pak Burhan yang memang orang sini (Batang asli). Selama tiga bulan saya kerja di pendopo digaji sehari 100rb, namanya juga perempuan disuruh kerja ya saya manut mbak, meskipun pekerjaan rumah ditinggal, juga saya jualannya malem (jualan jamu). Jadi kerjanya itu mulai jam 7 pagi berangkat, absen, tanda tangan dan sarapan. Saya kerjanya sebagai korlap, mondar mandir dari daerah satu ke daerah lain, tugasnya nulis KK dan NIK buat data, tapi emang Pak Burhan (calon nomor 3) itu kurang dana, makanya kalah sama calon lain yang memberi uang lebih banyak. Calon nomor 3 cuma ngasih 30 ribu, sedangkan calon nomor 1 ngasih 75 ribu. Kalau di kampung biasanya kan yang memberi uang banyak itu yang dicoblos. Saya sebagai korlap hanya menjalankan tugas, untuk pilihan warga ya terserah mereka saja.” (wawancara 03 April 2019).

Luasnya jaringan yang dimiliki seorang broker dapat mempermudah mendapatkan dukungan pemilih. Hal ini dikarenakan dalam pencatatan data pemilih, broker lebih tahu kondisi masyarakat yang ada di wilayahnya. Ibu Siti mendapatkan tugas sebagai broker di wilayah RW yang ditempatinya. Dalam melakukan tugasnya, Ibu Siti melakukan pencatatan data tersebut dengan cara mendatangi rumah warga di wilayah RT yang ditempatinya. Sementara itu, di RT lain ada koordinator lapangan (korlap) yang masing-masing RT mendapat satu orang yang dipercaya untuk mencatat data warga. Data itu kemudian dikumpulkan di rumah Ibu Siti.

Dalam melakukan tugas, posisi Ibu Siti sebagai broker hanya menjalankan tugas saja. Terlihat dari informasi yang Ibu Siti katakan bahwa dia tidak ada unsur untuk mengarahkan secara antusias kepada warga yang didatanya agar memilih calon kandidat yang diusungnya. Ibu Siti menyadari kurangnya dana dari calon kandidat yang dibantunya sehingga tidak ada tindakan yang mendoktrin untuk mengajak warga memilih kandidat tersebut. Ibu Siti hanya menjalankan tugas sebagaimana prosedur yang diberikan dari atasan, yaitu mencatat NIK dan NKK. Dia merasa jika mengajak warga secara berlebihan sedangkan uang yang diberikan hanya sedikit (karena ada calon kandidat lain

² Broker adalah orang yang menjadi perantara dalam penyebaran uang dari calon kandidat kepada pemilih atau warga.

memberikan uang lebih banyak) yang nantinya akan protes dan berimbas pada dirinya.

Hasil yang diperoleh dari data dilapangan mengenai adanya politik uang dalam pilkada menunjukkan bahwa politik uang masih ada dan berjalan. Dengan strategi pengumpulan data seperti paparan di atas menunjukkan bahwa suara pemilih bisa diukur melalui seberapa banyak data yang terkumpul. Dengan demikian, kandidat bisa memperkirakan model strategi yang digunakan agar memperoleh suara pemilih sebanyak-banyaknya. Kandidat juga menggunakan jaringan perantara (broker) untuk mengorganisir kampanye dan menyampaikan informasi tentang profil mereka kepada pemilih.

Suburnya politik uang ketika musim pilkada membuat warga merasa senang, karena pilkada yang dijadikan ajang untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari kandidat membuat masyarakat lupa dari tujuan pilkada yang sebenarnya. Sikap dari masyarakat tersebut menjadikan kandidat yang mempunyai sedikit dana sulit untuk mendapatkan suara pemilih, karena mereka menganggap bahwa visi misi tanpa uang tidak akan berhasil memberikan suara yang maksimal. Oleh karena itu, jarang sekali kandidat yang hanya mengandalkan kampanye tanpa pemberian uang. Pada awal pencalonan, kandidat yang idealis tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menggunakan uang sewaktu pilkada. Namun demikian, menjelang hari pemilihan, di lapangan ditemukan bahwa kandidat lain menggunakan politik uang sebagai strategi untuk mendapatkan suara pemilih. Hal itulah yang membuat kandidat yang idealis tadi akhirnya menggunakan politik uang demi memperoleh suara pemilih.

Berdasarkan informasi dari kelima informan di atas, ada kesamaan sudut pandang dengan teori patronase yang membahas hubungan patron-klien juga terdapat hubungan resiprositas yang memiliki nilai dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, norma resiprositas dalam hubungan patron-klien memiliki prinsip bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya jangan sampai merugikannya (Scott, 1989:255). Norma resiprositas dalam hubungan ini di dalam masyarakat tradisional dijadikan sebagai landasan struktur persahabatan dan persekutuan.

Dengan mengumpulkan NIK dan NKK, warga sudah yakin memilih calon kadidat yang memberikannya uang, karena hal tersebut merupakan suatu wujud timbal balik yang diberikan warga dengan bukti mengumpulkan data

berupa NIK dan NKK. Pemberian uang dengan cara terstruktur seperti di Desa Kasepuhan merupakan suatu cara yang dinilai tim sukses cukup efektif, karena mereka mengikat warga secara sosial untuk menunjukkan rasa timbal balik atas uang yang mereka berikan. Cara tersebut diperkuat juga dengan menyebarkan nomor HP kepada korlap atau tim sukses setempat untuk mengingatkan warga, terutama pada hari pemilihan agar tidak lupa untuk memilih kandidat yang telah memberikan uang kepada mereka. Data yang sudah dikumpulkan (berupa NIK dan NKK) akan diserahkan kepada korlap setempat untuk diperhitungkan berapa banyak amplop yang disebar dan berapa presentase suara yang akan didapatkan ketika hari pemilihan. Dengan hal itu, tim sukses dan calon kandidat bisa memperkirakan jumlah suara yang akan diperoleh dari seberapa banyak data yang terkumpul, sehingga dalam penentuan strategi bisa lebih dioptimalkan guna memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, alur pendataan untuk memperoleh suara pemilih yaitu dimulai dengan cara mendatangi rumah warga, kemudian mengumpulkan NIK dan NKK serta nomor HP, selanjutnya yaitu mencatat data-data yang sudah terkumpul, baru kemudian direkapitulasi menjadi daftar pemilih yang akan mencoblos calon kandidat yang telah menerima data mereka.

Kegiatan mengumpulkan NIK dan NKK yang dilakukan oleh broker kepada warga di atas memunculkan hubungan personal. Warga yang didatangi rumahnya untuk dimintai data merasa tidak enak jika tidak memberikan data itu. Hal inilah yang membuat warga akan memilih kandidat yang telah meminta data mereka, karena warga merasa sudah mendapat kepercayaan dari broker untuk memilih calon kandidat yang telah dianjurkan broker.

Hubungan personal seseorang merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara kandidat dengan warga yang menyebabkan hubungan terjadi tidak bersifat semata-mata bermotifkan keuntungan saja, melainkan juga mengandung unsur perasaan yang biasa terdapat dalam hubungan yang bersifat pribadi. Hubungan yang mengandung unsur perasaan yang seperti ini telah menimbulkan rasa saling percaya dan keakraban antara warga dan kandidat, sehingga dengan demikian dalam hubungan yang bersifat personal ini menyebabkan ikatan emosional masing-masing pihak semakin kuat, sehingga hubungan patron-klien seperti ini sulit untuk diputuskan.

2. Simbol Politik Uang Melalui Pemasangan Stiker

Upaya selanjutnya setelah pengumpulan data yaitu pemasangan stiker di rumah warga. Hal itu dilakukan sebagai tanda bahwa rumah tersebut akan memilih kandidat yang memberikan uang kepada mereka dan sebagai pengingat ketika masuk rumah mereka akan melihat foto kandidat yang akan dipilihnya. Salah satu tim sukses yang penulis temui bernama Bapak Hakim mengatakan bahwa:

“Dengan data jumlah penduduk yang sudah terkumpul dari masing-masing koordinator RT, mereka mulai membagikan amplop kepada warga yang rumahnya ada setiker gambar kandidat nomor urut 1 (satu). Beberapa calon kandidat dalam pilkada 2017 di Kabupaten Batang tidak menggunakan strategi kampanye terbuka dan konvoi di jalan menggunakan kendaraan. Mereka menilai bahwa cara-cara demikian tidak efektif untuk mendapatkan suara terbanyak dari warga. Keikutsertaan mereka dalam kampanye terbuka karena perintah dari partai politik dan menjaga reputasi partai politik dipandangan masyarakat. Selain dengan menempelkan stiker, cara lain yang digunakan yaitu silaturahmi ke rumah tokoh-tokoh yang berpengaruh di tingkat kecamatan maupun di daerah. Kegiatan itu untuk memperkuat jaringan agar rencana yang disiapkan dari para tim sukses tidak terganggu. Hal tersebut sebenarnya hanya untuk berjaga-jaga saja, karena tidak ada pengaruh besar dalam memperoleh suara pemilih yang 75% lebih terpengaruh kepada uang.” (wawancara 27 Maret 2019).

Pernyataan Bapak Hakim di atas diperkuat dengan pernyataan informan lain bernama Mas Rudi yang menyampaikan bahwa:

“Politik uang di Desa Kasepuhan masih ada, terutama pemberian uang langsung kepada warga. Selain itu juga masih ada peralihan-peralihan yang digunakan sebagai salah satu strategi politik uang, seperti mengadakan perkumpulan yang nanti diberikan uang transport dan juga pemberian stiker di rumah warga. Namun politik uang yang paling jelas ketika menjelang hari H pemilihan, yang biasa disebut dengan serangan fajar. Selain itu juga biasanya para kandidat melakukan kunjungan ke rumah tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk silaturahmi sekaligus meminta bantuan, baik doa restu maupun untuk mengajak masyarakatnya untuk memilih calon kandidat tersebut. Silaturahmi yang dilakukan oleh para kandidat bertujuan untuk mengetahui masyarakat di daerah yang dikunjunginya. Peran silaturahmi juga didalamnya terdapat penyaluran sumber daya material yang bertujuan mendapatkan dukungan politik.” (wawancara 26 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, cara lain dalam politik uang yaitu dengan pemasangan stiker di rumah warga. Hal itu digunakan sebagai tanda

bahwa warga sudah menjadi daftar pemilih kandidat yang telah mendatangnya, baik melalui korlap dan tim sukses maupun kandidat datang langsung ke rumahnya.

Sebagian warga yang masih pragmatis masih terpengaruh dengan kuatnya jumlah uang yang diberikan ketika pilkada. Mereka menyetujui pemasangan stiker di rumah karena stiker merupakan benda kecil yang dirasa tidak mengganggu kenyamanan mereka. Mereka mengizinkan penempelan stiker karena penempelan stiker dirasa bukan suatu hal yang salah dan merugikan. Justru hal itulah yang membuat mereka memperoleh uang. Bahkan hanya dengan dipasang stiker mereka akan mendapatkan imbalan (uang) ketika menjelang pilkada tanpa perlu bekerja.

Pemasangan stiker yang dilakukan di rumah warga merupakan suatu hal yang dianggap biasa. Broker maupun tim sukses tidak merasa bahwa hal itu merupakan suatu pelanggaran dalam kampanye. Mereka merasa jika tyan rumah sudah memberi izin untuk menempelkan stiker maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Padahal menempelkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai zona ketentuan dari KPU merupakan suatu jenis pelanggaran pemilu.

Peraturan KPU Nomor 1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye menyebutkan bahwa kandidat hanya boleh memasang 1 (satu) unit spanduk di satu zona yang akan ditentukan KPU dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, hampir semua calon kandidat memasang alat peraga kampanye tanpa aturan. Dalam satu zona, ditemukan beberapa gambar kandidat yang berbeda. Bahkan di tempat-tempat yang dilarang, seperti di pohon, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya.

Salah satu model kampanye dengan cara menempelkan stiker, pamflet, dan baliho menjelang pilkadapun bervariasi. Sebagian kandidat memasang alat peraga kampanye di ruang iklan resmi yang disediakan pemerintah di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis. Selain di tempat resmi, alat peraga kampanye juga dipasang di pinggir jalan, baik dipasang menggunakan bambu maupun ditempelkan di pepohonan, tembok rumah, tembok bangunan, tembok jembatan, mobil angkutan umum, mobil pribadi, motor, perahu, dan lain-lain (Wahid, 2015:309).

Mengamati fenomena tersebut di atas, tim sukses telah melakukan suatu hal yang melanggar peraturan KPU Nomor 1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, karena telah menempelkan alat peraga pada tempat yang tidak sesuai aturan yang dibuat oleh KPU. Selain memasang alat peraga kampanye lebih dari satu zona, hal itu juga mengganggu kenyamanan warga lain. Meskipun sudah diizinkan tuan rumah, beberapa tetangga disekitarnya yang tidak ditandai stiker akan merasa terganggu.

Cara lain yang dilakukan oleh kandidat dalam melancarkan proses politik uang selain pemasangan siker yaitu melakukan kunjungan ke tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Kasepuhan. Hal tersebut bertujuan untuk meminta doa restu dan bantuan melalui silaturahmi yang dilakukan. Ketika silaturahmi para calon kandidat berkunjung tidak dengan tangan kosong. Hal demikian dilakukan karena meminta dukungan tanpa memberi imbalan mereka merasa tidak sopan bahkan merasa malu. Sikap tersebut merupakan sebuah perwujudan dari keyakinan lokal bahwa suatu perilaku tidak sopan ketika berkunjung ke rumah seseorang, terutama jika meminta bantuan tanpa membawa buah tangan. Jika ada calon kandidat yang mendatangi rumah warga tanpa membawa apapun, maka dia akan dinilai sebagai orang pelit. Penilaian tersebut akan melekat pada dirinya, maka dia akan kesulitan mendapatkan simpati masyarakat. Bahkan tradisi *sowan* (kunjungan hormat ke rumah seorang tokoh) juga mengharuskan seseorang untuk membawa sesuatu.

3. Modus Pemberian Uang

Berkaitan dengan pendistribusian uang menjelang pilkada, beberapa tim sukses dari salah satu kandidat yang penulis temui memberikan banyak informasi terkait pendistribusian uang ketika menjelang pilkada. Salah satu tim sukses yang penulis temui bernama Bapak Budi. Bapak Budi merupakan salah satu anggota partai PKB dan juga sekretaris tim kampanye kandidat nomor urut 3 (tiga). Bapak Budi mengatakan bahwa:

“Strategi utama kandidat nomor 3 (tiga) dalam upaya untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya yaitu dengan menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Batang. Calon nomor 3 (tiga) juga mengunjungi beberapa desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa yang lebih maju dan produktif. Namun, pada hari pemilihan justru finansial yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara. Hal inilah yang

membuat kandidat nomor 3 (tiga) menggunakan uang karena terpaksa, semua calon lain menggunakan uang semua, jadi akhirnya memilih alternatif dengan memberikan uang kepada masyarakat meskipun tidak secara merata.” (wawancara 27 Maret 2019).

Penuturan lain dari Bapak Hakim sebagai salah satu tim sukses di tingkat kabupaten mengatakan bahwa:

“Dalam pembentukan tim sukses kami sangat terstruktur, dari tim sukses di tingkat kabupaten sampai di tingkat RT. Para tim sukses tersebut mendapat tugas masing-masing sesuai dengan wilayah yang dibagi. Penyebaran amplop ketika H-1 menjelang hari pemilihan sudah disusun cara dan strategi yang akan digunakan melalui pertemuan (*briefing*). Jumlah uang yang dibagikan dari kandidat itu sama, kemudian dibagikan melalui broker di tempat-tempat yang menjadi target, setelah itu broker mempunyai hak penuh dalam membagikan uang, disitu kecurangan dimulai. Beberapa broker yang ingin mengambil keuntungan dari pilkada ini membuka amplop yang berisi uang dan beberapa ada yang diambil kemudian diganti amplop yang baru dengan nominal yang berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh para timses, cara broker untuk mengurangi jumlah nominal uang yang akan dibagikan merupakan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, tim sukses mengantisipasi dengan cara membagi koordinator setiap RT hanya memegang 40 (empat puluh) amplop untuk mengurangi adanya kecurangan dan efisiensi waktu dalam proses penyebaran amplop.” (wawancara 27 Maret 2019).

Dengan demikian, uang masih menjadi alat pertimbangan yang cukup berpengaruh dikalangan warga Kasepuhan untuk menentukan pilihan ketika pilkada. Uang merupakan salah satu sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan menjadi salah satu faktor penting yang berguna untuk mempengaruhi personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni, dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai cara termasuk uang (Simatupang, 2018:1306).

Keberhasilan *vote buying* sangat ditentukan oleh broker. Broker yang hanya mengambil keuntungan, *vote buying* akan gagal karena uang berhenti di tangan broker. Di tangan kader partai yang loyal dan berintegritas, praktik *vote*

buying akan sukses dijalankan. Hal tersebut dikarenakan model strategi yang digunakan masing-masing broker sangatlah berbeda. Ada yang langsung datang ke rumah warga dan ada juga yang melalui tokoh masyarakat untuk membagikan uang kepada warga.

Strategi pemenangan yang digunakan kandidat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu strategi personalistik dan strategi matrealistik. Pengelompokan tersebut didasarkan pada dua paradigma pemenangan pilkada yang berkembang di kalangan calon kandidat. Pertama, paradigma personalistik yang menyatakan bahwa pada dasarnya orang akan memilih calon kandidat yang dia kenal, terlebih memiliki hubungan personal. Semakin dekat hubungan calon kandidat dengan pemilih, semakin besar kemungkinan calon kandidat itu terpilih. Kedua, paradigma matrealistik yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang cenderung memilih kandidat yang paling menguntungkan bagi dirinya. Keuntungan instant yang paling bisa dinikmati dalam konteks pilkada adalah keuntungan materiil, baik berupa uang, barang ataupun jasa. Paradigma ini menegaskan bahwa kehidupan seseorang ditentukan oleh pilihan ekonominya (Wahid, 2015:308).

Cara menyebarkan uang yaitu satu hari sebelum menjelang pemilihan, dengan datang ke rumah warga yang sudah didata secara sembunyi-sembunyi, karena biasanya menjelang hari pemilihan banyak panitia pengawas (panwas) yang keliling desa untuk mengawasi terjadinya kecurangan dalam pilkada. Ibu Siti juga mengatakan bahwa:

“Warga menerima uang sebesar 75.000 rupiah dari kandidat nomor urut 1 (satu), warga lain yang penulis temui mengaku menerima uang dari kandidat nomor urut 3 (tiga) sebanyak 30.000 rupiah. Informasi tersebut diperoleh dari keluarga saya yang menerima uang dari calon yang berdeda-beda. Perbedaan jumlah nominal yang cukup banyak membuat warga terpengaruh untuk mencoblos kandidat nomor urut 1 (satu) atas asumsi pemberian uang yang lebih banyak. Meskipun ada juga warga yang sudah mengerti dan sadar tentang partisipasi politik, uang tetap menjadi sebuah pertimbangan tersendiri untuk menentukan pilihan pada waktu pemilu.” (wawancara tanggal 03 April 2019).

Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas sebagai broker, Ibu Siti tidak memaksakan warga yang didatanya untuk memilih kandidat nomor 3 (tiga). Ibu Siti menyadari bahwa warga cenderung akan memilih kandidat yang

memberikan uang terbanyak. Kecuali memang warga itu konsisten terhadap pilihannya. Meskipun sudah didata dengan mengumpulkan NIK dan NKK namun masih ada warga yang mendapatkan uang dari dua kandidat. Sehingga hal itulah yang membuat Ibu Siti pasrah terhadap hasil suara yang akan didapatkan oleh calon kandidat yang didukungnya.

Informan selanjutnya bernama Ratih, salah seorang koordinator desa (kordes) Kasepuhan. Ratih mengatakan bahwa:

“Ketika saya membagikan uang sewaktu hari pemilihan dengan cara mendatangi setiap TPS. Saya menyuruh orang di TPS untuk membagikan uang yang setiap warga mendapatkan uang 30.000 rupiah. Namun, uang tidak dibagikan kepada semua warga yang sudah didata, karena saya menerima uang dari atasan hanya sedikit, tidak sesuai yang diperkirakan warga yang sudah di data akan mendapatkan uang secara merata.” (wawancara 03 April 2019).

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa broker di Desa Kasepuhan tidak melakukan hal untuk kepentingan dirinya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Siti dan Ibu Ratih, mereka sudah melakukan tugas sesuai yang diberikan oleh atasan. Namun dalam mengajak warga untuk memilih kandidat kurang maksimal. Karena keterbatasan dana yang diberikan membuat mereka resah untuk mengajak warga secara antusias namun respon warga yang diberikan kurang baik.

Informasi lain yang diberikan oleh Rudi yaitu:

“Jumlah nominal yang diberikan masing-masing kandidat juga masing-masing bervariasi, yaitu dari 30.000 rupiah hingga 75.000 rupiah. Namun biasanya ada perbedaan antara nominal yang diberikan salah satu calon kandidat kepada masyarakat antara daerah satu dengan yang daerah yang lain. Biasanya broker yang ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri sehingga ketika diberi amplop dia mengurangi jumlah nominal yang ada diampolop untuk dirinya.” (wawancara 26 Maret 2019).

Desa Kasepuhan yang merupakan wilayah di kawasan perkotaan ternyata masih menjadi target beberapa calon kandidat untuk membagikan uang pada masa pilkada. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan politik uang merasa hal tersebut sudah tidak asing, karena setiap ada pemilu biasanya ada uang yang dibagikan juga. Justru beberapa orang merasa senang ketika menjelang pemilu yang merupakan suatu kondisi untuk mendapatkan uang secara sukarela, ada juga yang berpendapat bahwa uang yang mereka terima itu sebagai pengganti penghasilan, karena waktu pemilu mereka libur kerja.

Adapun informan selanjutnya bernama Yanto mengatakan bahwa:

“Menjelang hari H, uang bisa mengubah penilaian rakyat dengan sekejap. Mereka memilih calon kandidat yang memberikan uang lebih banyak. Pada saat itu, kandidat nomor 1 (satu) memberi uang 50.000 di daerah kabupaten, dan 75.000 di daerah kota. Kandidat nomor urut 2 (dua) memberi uang 40.000 di daerah kabupaten, dan 60.000 di daerah kota. Kandidat nomor urut 3 (tiga) memberi uang 30.000 di daerah Kabupaten, dan 50.000 di daerah kota. Persaingan antara kandidat nomor 2 (dua) dan nomor 4 (tidak) tidak begitu kentara di daerah kota, karena masing-masing calon mempunyai wilayah tersendiri sebagai sasaran untuk memperoleh suara terbanyak. Di daerah kota, kandidat nomor urut 1 (satu) dan 3 (tiga) yang dominan untuk berkompetisi mendapatkan suara terbanyak dari pemilih. Saat menjelang pilkada, terutama H-1 dijadikan sebagai strategi utama dalam meyakinkan rakyat untuk memilih mereka melalui uang yang mereka berikan, karena dirasa lebih efisien dan cepat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Informasi tersebut saya dapatkan ketika bertugas di lapangan sebagai tim sukses salah satu calon kandidat dan meninjau kondisi di lapangan sewaktu menjelang hari pemilihan.” (wawancara 27 Maret 2019).

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas tampak bahwa politik uang masih ada ketika pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagaimana data tersebut, jika dipetakan alasan adanya politik uang akan menggambarkan skema berikut:

Tabel 6
MEKANISME PRAKTIK POLITIK UANG

No	Mekanisme	Alur	Alasan
1	Pengumpulan NIK dan Nomor KK oleh Broker	Broker mendatangi rumah warga → meminta warga untuk mengumpulkan NIK dan NKK → meminta nomor HP → mencatat data → warga tanda tangan → merekap pemilih	Sebagai cara yang efektif untuk memperoleh dukungan warga
2	Simbol Politik Uang Melalui Pemasangann	Mendatangi rumah warga (yang sudah di data sebelumnya) → meminta izin	Untuk mempermudah dalam pembagian uang, juga sebagai tanda supaya

	Stiker	untuk menempelkan stiker→ memasang stiker di tempat yang jelas untuk dijadikan sebagai tanda	rumahnya tidak dimasuki oleh kandidat yang lain
3	Modus Pemberian Uang	Broker menerima uang dari atasan→ membagi uang kepada korlap per RT sesuai data yang direkap→ korlap mendatangi rumah warga h-1 menjelang pilkada→ warga menerima uang	Dilakukan sehari sebelum hari pemilihan dan pagi hari saat hari pemilihan, penyebaran dilakukan sesuai strategi kandidat masing-masing

Sumber: *Analisis Primer*

Berdasarkan pemetaan di atas, tampak bahwa dalam melakukan praktik politik uang tidak langsung sekali jalan, namun ada beberapa mekanisme di dalamnya untuk mencapai target yang diharapkan. Dari pengumpulan data sampai pada tahap akhir yaitu pemberian uang kepada warga, peran tim sukses dan broker sangat berpengaruh menentukan jumlah suara yang diperoleh ketika pilkada. Selama persiapan itu, tim sukses dan broker lebih mengerti kondisi yang ada di lapangan, sehingga mereka mengetahui bagaimana strategi yang efektif untuk digunakan dalam pembagian uang agar sesuai dengan yang ditargetkan. Hal tersebut juga tidak lepas kontrol dari tim sukses di tingkat kabupaten. Mereka tetap melakukan pemantauan dan pengarahan (*briefing*) sebelum tim sukses yang berada di tingkat kecamatan dan desa terjun ke lapangan sesuai dengan pedoman dari partai dan calon kandidat agar menghindari kecurangan tim sukses dalam menjalankan tugas di lapangan.

Politik uang biasanya dikaitkan dengan masalah suap-menyuap dengan sasaran memenangkan salah satu kandidat dalam pemilihan. Padahal apabila dilihat secara lebih luas, politik uang dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilu). Kita mengetahui yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyusunan. Namun, ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya mendapatkan

dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan dana tersebut (Santoso, 2007: 63).

Berdasarkan hasil wawancara, politik uang bisa terjadi karena kedua belah pihak (calon kandidat dan pemilih) sama-sama memberi ruang untuk itu. Dari sisi masyarakat jika tidak mau menerima politik uang, maka dari calon kandidatpun tidak akan menjadikan politik uang sebagai strategi. Jadi dengan mengubah cara pandang masyarakat terkait massa pemilu dapat dirubah secara perlahan. Masyarakat bisa memilih kandidat berdasarkan visi dan misi yang disampaikan, mengenali kandidat, dan mengakses informasi terkait profil dan dari partai mana calon kandidat melalui baliho yang terpasang maupun melalui internet. Hal itu dapat mengurangi adanya indikasi politik uang, karena jika masyarakat dapat menyadari tentang hal itu, kandidatpun akan berpikir ulang jika mau menggunakan politik uang. Luasnya wawasan masyarakat yang tidak mudah terpengaruh oleh uang untuk menjamin lima tahun ke depan akan membuat kandidat bersaing secara sehat dan kritis untuk memenangkan suara rakyat. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin lebih bersungguh-sungguh sesuai visi misi yang disampaikan, karena untuk mencapai di posisi tersebut tidak dilakukan hanya dengan uang, tetapi dengan tekad untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Strategi politik uang yang dilakukan dengan tiga tahap di atas untuk memenangkan suara pemilih merupakan sebuah hal yang sudah biasa terjadi di Kelurahan Kasepuhan. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal sewaktu pemilu, untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat (Schroder. 2009:7). Dalam konteks ini yang dimaksud strategi politik yaitu ketika para kandidat dan tim suksesnya akan menyebarkan uang menjelang hari pemilihan.

Penuturan terkait strategi politik oleh salah satu tim sukses yang juga anggota partai PDIP yang bernama Hakim. Hakim menyampaikan:

“Selama masa pemilihan hanya menggunakan uang saja sebagai strategi kemenangan. Dalam penyebaran amplop sendiri, kita (para tim sukses) sudah memprediksi akan memperoleh hasil suara sekian dari penyebaran 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu) amplop yang disebar, bahkan sudah menghitung margin error-nya. Hal ini dia sampaikan karena melihat fakta di lapangan, 75% pemilih pragmatis masih memikirkan jumlah uang yang akan diterima pada saat pilkada. Maka dari itu, strategi yang digunakan dari kandidat nomor 1 (satu) adalah dengan membentuk koordinator timses dari tingkat kabupaten sampai di tingkat Rukun tetangga (RT). Pembagian amplop yang dilakukan oleh timses nomor urut 3 dengan melalui koordinator disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) memberikan amplop kepada masyarakat yang sudah didata sebelumnya, namun tidak semua warga yang didata mendapatkan uang semua karena terbatasnya dana yang diberikan. Dalam pilkada 2017 di Desa Kasepuhan terdapat suatu fenomena yang sangat mencolok antara kandidat nomor urut 1 (satu) dengan kandidat nomor urut 3 (tiga). Kandidat nomor urut 1 (satu) yang merupakan pendatang (tidak orang Batang asli) tiga bulan sebelum hari pemilihan baru pindah mendapat perhatian khusus dari timses kandidat yang lain, khususnya timses nomor urut 3 (tiga). Mereka menganggap bahwa kandidat nomor 1 (satu) hanya menggunakan uang saja untuk menang, sedangkan dari segi kampanye maupun strategi yang digunakan kurang maksimal. Berbeda dengan kandidat nomor urut 3 (tiga) yang merupakan orang Batang ‘asli’, salah satu tokoh aktivis di Batang sejak lama, mempunyai jaringan yang luas, juga dalam strategi kampanye sudah dirasa maksimal.” (wawancara 27 Maret 2019).

Dengan demikian, dapat dilihat dari data di atas bahwa uang masih menjadi cara ampuh untuk mendapatkan suara pemilih. Seperti pemaparan informan di atas, kebanyakan pemilih masih bersifat pragmatis. Kandidat yang sudah melakukan strategi politik sesuai prosedur kampanye tetap kalah dengan finansial yang diberikan kandidat lain yang tidak atau hanya sedikit melaksanakan prosedur kampanye.

B. Sikap Kelas Menengah terhadap Praktik Politik Uang

Sikap dikomposisikan sebagai komponen perasaan, yaitu perasaan yang mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung pada suatu objek. Sikap juga diartikan sebagai kepercayaan, opini, tindakan, dan perhatian yang bersangkutan pada jasa (Umar, 2003:147). Secara sederhana sikap dapat didefinisikan sebagai ekspresi dari suka atau tidak suka, mendukung atau tidak mendukung terhadap objek tertentu, dan jika penulis hubungkan dengan kajian ini maka sikap adalah perasaan informan terhadap adanya politik uang.

Setelah mengetahui adanya politik uang dalam pilkada 2017 di Desa Kasepuhan, penulis juga sudah melakukan wawancara terkait tanggapan masyarakat tentang politik uang. Ada beragam jawaban dari yang sangat sederhana hingga menanggapi dengan sangat substantif. Dari beragam data mengenai sikap masyarakat tentang adanya politik uang, penulis memetakan menjadi dua bentuk dalam menyikapi politik uang, yaitu tanggapan masyarakat tentang politik uang, dan pengaruh politik uang dalam memilih calon kandidat di Desa Kasepuhan:

1. Warga Kasepuhan menanggapi Politik Uang

Sebelum memaparkan hasil wawancara penulis dengan informan, perlu ditekankan disini bahwa unsur pertukaran dalam patronase terkadang problematik, karena dalam patronase tidak ada jaminan bahwa pemilih yang diberi uang akan memilih kandidat yang memberikan mereka uang. Ketika kandidat atau pasangan calon mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk respon balik yang akan diberikan oleh pemilih. Hal tersebut sebenarnya menjadi salah satu masalah utama dalam politik patronase (Aspinall dan Sukmajati, 2015:22). Pada pemilu yang bebas rahasia, para pasangan calon pembeli suara biasanya tidak mempunyai jaminan bahwa pemilih yang menerima pemberiannya akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihan. Pemilih akan melihat keuntungan yang mereka peroleh dengan beragam cara. Beberapa pemilih mungkin berpikiran bahwa mereka terikat kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada si pemberi. Beberapa lainnya menganggap hal itu sebagai pemberian yang tidak mengikat, sedangkan yang lainnya justru merasa tersinggung.

Dari pemaparan teori pertukaran patronase di atas, penulis menemukan jenis-jenis pemilih yang sesuai dengan teori di atas. Seperti yang dipaparkan oleh informan yang bernama Ika bahwa:

“Ketika mereka mendapatkan uang sewaktu menjelang hari H pilkada. Beberapa berpendapat bahwa ketika menerima uang atau tidak mereka akan tetap mencoblos sesuai pilihan mereka, karena mereka menilai uang bukan menjadi jaminan untuk mendapatkan pemimpin yang baik selama lima tahun kedepan.” (wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Pentingnya memilih pemimpin yang baik selama lima tahun ke depan tidak hanya bisa diukur dengan jumlah uang yang kandidat berikan. Kompeten dan integritas yang tinggi kepada masyarakat untuk mengembangkan daerah masih menjadi penilaian beberapa warga yang sudah mengerti hakikat dari seorang pemimpin. Tanggapan semacam itu penulis dapatkan ketika mewawancarai informan yang biasanya aktif dalam kegiatan pemilu, seperti menjadi petugas KPPS, aktif di karang taruna, dan mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup.

Informan yang bernama Nia juga menanggapi bahwa:

“Pemberian uang ketika menjelang pilkada merupakan sesuatu yang wajar, karena itu sebagai pengganti upah ketika mereka libur kerja. Adapun para calon kandidat mengasih uang merupakan hak mereka dan hak masyarakat juga untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Jadi mereka menganggap uang tidak mempunyai pengaruh untuk mengubah pilihan saya..” (wawancara 05 April 2019).

Penjelasan dari Nia merupakan salah satu prespektif yang perlu diluruskan, dari tingkat kesadaran, masyarakat yang memiliki pemikiran seperti itu sudah mengerti substansi dari mencoblos ketika masa pilkada, yaitu untuk memilih pemimpin yang sesuai keinginan mereka. Namun demikian, respon terhadap politik uang yang mereka terima dengan beranggapan bahwa itu merupakan upah pengganti saat kerja. Mereka menganggap bahwa untuk merelakan jam kerja itu politik uang ini berfungsi, jadi hal itu merupakan sesuatu yang wajar.

Informasi lain mengenai adanya politik uang dari Ibu Yani yaitu:

“Ketika saya menerima uang berarti saya sudah mendapat kepercayaan untuk memilih calon kandidat yang memberi saya uang, maka saya akan memilih calon kandidat tersebut,. Sebelum saya menerima uang, saya mengumpulkan NIK dan Nomor KK sebagai syarat bahwa saya akan memilih calon kandidat yang menyimpan data diri, jadi saya menganggap bahwa proses itulah yang membuat saya berpikir memilih calon kandidat yang memberi saya uang sebagai timbal balik atas apa yang saya terima.” (wawancara tanggal 28 Maret 2019).

Sikap Ibu Yani tersebut sesuai dengan teori Scott tentang salah satu tipe pemilih di dalam hubungan patron-klien terdapat hubungan resiprositas, yang memiliki nilai dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, norma resiprositas dalam hubungan patron-klien memiliki prinsip bahwa orang harus membantu mereka

yang pernah membantunya atau setidaknya jangan sampai merugikannya (Scott, 1989: 255).

Pendapat lain mengenai tanggapan politik uang yaitu beberapa menganggap politik uang sebagai fenomena yang wajar, seperti pemaparan dari Bapak Rohmat, dia mengatakan bahwa:

“Masyarakat juga membutuhkan uang, apalagi saat pemilu bisa dijadikan ajang untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja yang menjadikan politik uang sebagai gejala baru untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pemilu. Masyarakat yang berusia lanjut justru mempunyai pendapat jika saat pilkada tidak mendapat uang maka tidak akan datang ke TPS untuk mencoblos, karena untuk datang ke TPS juga butuh yang namanya usaha meluangkan waktu, mengorbankan aktivitas kesehariannya, jadi itu sebagai imbalan untuk mencoblos.” (wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Respon lain yang dilakukan oleh Rudi yaitu:

“Ketika saya menerima uang dari calon kandidat, saya menerimanya kemudian uang tersebut diberikan kepada orang lain, karena saya menilai ada atau tidak adanya uang tidak akan mempengaruhi pilihannya ketika pilkada, dan saya memilih sesuai keinginan.” (wawancara tanggal 26 April 2019).

Dari pemaparan lima informan di atas, penulis dapat memetakan respon warga ketika menerima uang dari calon kandidat sebagai berikut:

Tabel 7

**TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG PEMBERIAN UANG SEWAKTU
PILKADA**

No	Pemberian uang ketika pilkada	Tanggapan
1	Masyarakat oportunistis	Diterima, karena itu sesuatu yang wajar ketika pilkada, namun tetap memilih sesuai keinginan
2	Masyarakat pragmatis	Ketika diberi uang berarti harus memilih yang memberi uang

Sumber: *Analisis Primer*

Berdasarkan pemetaan di atas, dapat dilihat masing-masing respon dari pemilih, dan dapat dilihat bahwa sebagian besar warga Kasepuhan menerima

politik uang berupa pembelian suara (*vote buying*). Tanggapan warga dari yang mendapatkan uang dari calon kandidat tersebut berarti harus memilih. Ada juga yang menanggapi bahwa memberi uang merupakan hak dari kandidat, dan pemilih tetap memilih sesuai keinginan mereka. Hal ini berarti uang tidak menjadi jaminan untuk memperoleh suara terbanyak, masih banyak tipe pemilih yang apatis terhadap maksud dari politik uang. Mereka menganggap hal itu merupakan sesuatu yang wajar ketika menjelang pemilihan. Pemilih akan melihat keuntungan yang mereka peroleh dengan beragam cara. Beberapa pemilih mungkin berpikiran bahwa mereka terikat kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada si pemberi. Beberapa lainnya menganggap hal itu sebagai pemberian yang tidak mengikat, sedangkan yang lainnya justru merasa tersinggung.

Tidak bisa dipungkiri bahwa uang yang dibagikan itu cukup mempengaruhi pilihan warga, terutama yang secara nominal, jumlahnya paling besar diantara yang dibagikan oleh para calon kandidat. Dengan kata lain, ketika sebuah keluarga memperoleh amplop dari beberapa kandidat, dan diantaranya ada yang nominalnya lebih besar, maka kandidat tersebut akan diberi minimal satu suara dari jumlah anggota keluarga yang ada. Sebaliknya, ketika seorang calon kandidat tidak mengeluarkan uang untuk keperluan membeli suara (*vote buying*), besar kemungkinan ia tidak akan diperhatikan dan tentu tidak akan memperoleh suara yang signifikan. Dari perspektif calon kandidat, pengaruh uang dan besaran nominal ini hampir disepakati oleh sebagian besar dari mereka (pemaparan Bapak Hakim). Mereka juga menganggap praktik-praktik semacam ini bisa terjadi lantaran watak pemilih yang pragmatis. Tentu saja memang ada pemilih yang mengaku bahwa mereka menempatkan besaran nominal uang ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi preferensi mereka.

Penulis mendapatkan sudut pandang lain tentang politik uang yang dianggap masyarakat sebagai imbalan agar mau datang ke TPS. Penulis menemukan data bahwa politik uang dan datang ke TPS merupakan sesuatu yang berkaitan. Uang tersebut seolah-olah menjadi upah untuk datang ke TPS. Seperti yang disampaikan oleh ketua KPPS desa Kasepuhan, Bapak Agus. Bapak Agus mengatakan bahwa:

“Masih banyak masyarakat yang mengira demikian (uang merupakan upah), sehingga paham itulah yang perlu diluruskan agar tidak menjadi budaya baru tentang pemilu yang menggunakan embel-embel uang didalamnya. Dari KPU sendiri sudah melakukan sosialisasi mekanisme dan tata tertib pelaksanaan pemilu yang didalamnya berisi himbauan antara lain menghindari pelanggaran pemilu. Sikap apatis masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU yang menjadi gejala tersendiri untuk adanya politik uang dalam jangka waktu yang tidak tentu akan berhenti dan hilang dalam negara demokrasi.” (wawancara tanggal 30 maret 2019).

Pendapat lain yang disampaikan Ibu Ningsih yaitu:

“Politik uang jika dilihat dari segi norma merupakan hal yang tidak baik. Karena dengan hal itu berarti kita sudah menjual suara kepada calon kandidat yang memberikan uang. Namun tidak dipungkiri, sebagai warga jika mendapatkan uang merupakan sebuah kesenangan. Kita tidak perlu bekerja tapi mendapatkan uang dan hanya mendapat syarat untuk mencoblos kandidat tersebut. Pengaruh uang sangatlah kuat jika menjelang masa pilkada, meskipun beberapa ada yang memilih sesuai keyakinan, namun juga banyak yang warga terpengaruh oleh uang yang diberikan untuk memilih calon kandidat tersebut, meskipun mereka tidak kenal calon kandidat itu.” (wawancara tanggal 05 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas, masyarakat sebenarnya menyadari dampak dari politik uang. Namun demikian, di sisi lain masyarakat juga sudah terbiasa dengan fenomena tersebut, sehingga menganggap politik uang bukan suatu pelanggaran atau hal yang dilarang. Gejala baru adanya politik uang dalam demokrasi di Indonesia akan tetap ada sampai kapanpun kecuali ada perbaikan sistem undang-undang dari pemerintah. Tingkat kesadaran masyarakat tentang dampak politik uang juga berbeda, dilihat dari tanggapan mereka mengenai fenomena politik uang yang biasa terjadi di lingkungan mereka dan sikap mereka tentang hal itu. Dari sisi tim sukses sendiri juga sebenarnya sangat paham tentang dampak politik uang, mereka tetap menggunakan strategi tersebut karena melihat kondisi di lapangan dengan teori sangat berbeda. Mereka melihat dari respon dan kesadaran masyarakat yang ternyata masih pragmatis dan uang menjadi pertimbangan penting untuk memilih kandidat.

C. Masyarakat Desa Kasepuhan dalam Memaknai Politik Uang

Beberapa studi tentang *vote buying* (pembelian suara) di berbagai tempat menunjukkan bagaimana beragamnya makna uang itu bagi penerimanya. Misalnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Schaffer dan Schedler bahwa para penerimanya ada yang memaknainya sebagai upah (*wage*), hadiah (*gift*), pembayaran ganti rugi atas dosa masa lalu para elite (*restitution*), penghinaan (*affront*), tanda kebajikan seorang kandidat (*sign of virtue*), tanda keburukan seorang kandidat (*sign of vice*), serta ada juga yang menganggapnya sebagai tanda kekuatan dari seorang kandidat (*sign of strenght*). Dari sekian konstruksi makna tersebut, sebagian diantaranya juga ada di pemikiran masyarakat Kelurahan Kasepuhan (Schelder dan Schaffer, 2007: 25-27).

Setelah mengetahui adanya praktik politik uang dan menanggapi adanya politik uang, penulis juga melakukan wawancara terkait pemaknaan politik uang bagi masyarakat yang menerimanya. Informan yang bernama Ibu Ratih memaknai politik uang sebagai berikut:

“Adanya politik uang dijadikan sebagai modal untuk memenangkan pilkada, yang namanya modal pasti ingin dikembalikan. Politik uang juga bisa berdampak pada kinerja kepala daerah di parlemen. Dengan merasa sudah membeli suara rakyat dengan uang yang diberikan, para kandidat yang menang mempunyai kewenangan untuk bekerja semaunya dan akan berdampak ke pemerintahan negara. Tidak heran, jika banyak kepala daerah yang tertangkap oleh KPK terkait dengan kasus korupsi. Kasus politik uang sangat kecil untuk dapat dibuktikan dalam pelanggaran pemilu, karena jika salah satu orang mengakui perbuatannya, maka akan merambat sampai ke level atas. Sehingga akan berdampak pada kelangsungan proses pencalonan kandidat ke tahap selanjutnya.” (wawancara tanggal 03 April 2019).

Dari data yang diberikan oleh Ibu Ratih menunjukkan bahwa bahayanya politik uang yang akan terjadi untuk masyarakat dan juga kepada pemimpin yang terpilih dengan cara menggunakan politik uang. Masyarakat akan merasakan dampak dari pemimpin yang tidak kompeten dengan sulitnya menerima aspirasi rakyat. Dampak bagi pemimpin yang menggunakan politik uang yaitu mereka memiliki beban untuk mengembalikan modal awal semasa pencalonan sehingga berkemungkinan untuk melakukan korupsi.

Pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Yati bahwa:

“Munculnya politik uang dalam demokrasi sampai kapanpun ada, dipandang dari segi finansial, dalam mencalonkan diri sebagai kandidat tentunya memerlukan modal yang besar, termasuk membagikan uang kepada masyarakat untuk memperoleh suara juga butuh modal, dana yang diperoleh bukan hanya dari partai dan dana swadaya, namun ada juga beberapa pengusaha maupun investor dibelakang layar yang berkontribusi untuk pencalonan, maka dari itu ketika calon kandidat menang, secara otomatis ingin mengembalikan modal yang digunakan semasa pencalonan.” (wawancara tanggal 06 April 2019).

Ibu Ika dalam memaknai politik uang sebagai berikut:

“Ketika saya menerima uang dari salah satu calon kandidat, belum bisa dipastikan suara saya sudah terbeli, karena perputaran uang yang disebar oleh tim sukses terjadi tumpang tindih: satu orang pemilih bisa menerima uang dari dua kandidat. Hal demikian membuat saya merasa bingung untuk menentukan pilihan. Dengan menerima uang lebih dari satu calon kandidat, keluarga saya menyikapinya dengan cara membagi anggota keluarga untuk memilih masing-masing dari calon kandidat yang telah memberi uang.” (wawancara tanggal 05 April 2019).

Sikap dari Ibu Ika di atas masih mempertimbangkan seberapa banyak keuntungan yang akan diterimanya ketika menerima uang dari timses, namun dia tidak patuh pada ajakan timses yang memberi uang. Ibu Ika tetap memilih kandidat yang menurutnya sesuai dengan keinginannya. Kandidat yang memberikan uang kepada Ibu Ika tidak mempunyai pengaruh terhadap pilihan Ibu Ika. Namun demikian, Ibu Ika tetap menerima uang dari kandidat. Anggota keluarga yang masing-masing mendapatkan uang dari kandidat lain dijadikan sebagai alternatif agar masing-masing memilih calon yang telah memberikan uang.

Informasi dari Ibu Eli dalam memaknai bahwa:

“Politik uang sebagai sesuatu yang dilarang oleh agama, jika ingin memilih seorang pemimpin bisa dilihat dari visi misinya, mengenali karakter calon kandidat, dan mengetahui bagaimana sikapnya dalam memimpin. Jika tidak ada politik uang, pendapat rakyat akan lebih didengar hingga bisa disampaikan ke pemerintah lebih mudah untuk menuju perubahan yang lebih baik.” (wawancara tanggal 05 April 2019).

Mas Rudi memaknai politik uang sebagai berikut:

“Uang hanya bernilai ekonomis, jadi untuk di politik saya tidak berminat untuk menerima politik uang dan target politik uang juga

bisa dilihat dari tingkat pendidikan pemilih, untuk orang yang berpendidikan SMA ke atas, dirasa bisa menyikapi adanya politik uang, dalam memilih kepala daerah lebih melihat pada visi dan misi calon kandidat.” (wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Pemaknaan yang dipaparkan oleh Ibu Eli dan Mas Rudi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya politik uang itu merupakan hal yang tidak baik. Politik uang selain hal yang dilarang juga menjadikan pemimpin tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Pertimbangan memilih pemimpin bisa dilakukan dengan mengenali kandidat melalui visi misi yang disampaikan, latar belakang kegiatan kandidat, dan hal lain yang bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan.

Ibu Ningsih memaknai uang sebagai berikut:

“Ketika saya menerima uang itu sebagai sebuah rezeki. Saya menganggap bahwa sikap tidak mau menerima hal tersebut justru dianggap tidak baik, karena menolak rezeki sama halnya dengan menolak pemberian Tuhan. Di sisi lain, menolak uang tersebut juga bisa menyinggung perasaan anggota tim sukses yang mendistribusikannya, sedangkan sebagian besar mereka adalah tetangga penerima dalam satu wilayah atau satu Rukun Tetangga (RT) sehingga muncul rasa sungkan. Untuk urusan nanti milih siapa, saya tetap sesuai dengan pilihan saya” (wawancara tanggal 05 April 2019).

Dengan demikian, penilaian masyarakat yang menerima uang tersebut pada dasarnya jauh dari asumsi transaksi antara seorang pembeli dan penjual, seperti yang dibayangkan oleh para calon kandidat yang melakukan praktik pembelian suara.

Pendapat lain disampaikan Bapak Agus yaitu:

“Politik uang menurut saya sebagai uang yang tidak jelas halal atau haramnya (*syubhat*). Meskipun menerimanya, saya tidak membelanjakannya untuk keperluan konsumsi seperti makanan atau minuman yang nantinya masuk ke tubuh. Biasanya uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan selain konsumsi, seperti membeli bensin, membeli pulsa, dan membeli rokok.” (wawancara 06 April 2019).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa Bapak Agus masih memiliki pertimbangan doktrin agama dalam menilai praktik politik uang yang terjadi.

Selanjutnya pemaknaan politik uang selanjutnya yang disampaikan Bapak Adam yaitu:

“Uang sebagai upah pengganti waktu kerja saya yang tersita untuk datang memilih ke TPS. Dengan demikian, meskipun libur kerja, saya tetap mendapatkan penghasilan atau ganti ruginya. Dalam konteks ini, uang tentu bekerja untuk menggerakkan warga agar berpartisipasi dalam pemilihan, meskipun tidak dapat dipastikan juga bahwa calon kandidat yang memberi itu akan dipilih.” (wawancara tanggal 06 April 2019).

Dari hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa pemaknaan masyarakat menengah tentang politik uang sebenarnya mereka sudah mengerti tentang politik uang dan menyadari bahwa hal itu merupakan salah satu pelanggaran pemilu, namun ada beberapa faktor dan kondisi tentang politik uang yang masih ada di masyarakat sampai sekarang, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak dari politik uang.

Untuk memetakan pemaknaan politik uang, penulis membuat skema sebagai berikut:

Tabel 8
MAKNA POLITIK UANG (VOTE BUYING)

No	Subyek	Memaknai Politik Uang
1	Ibu-ibu rumah tangga	Sesuatu yang wajar. Sebagai suatu rezeki
2	Bapak paruh baya dan pekerja	Sebagai pengganti upah untuk datang ke TPS. Sesuatu yang belum jelas halal atau haramnya
3	Pemilih lainnya	Uang hanya bernilai ekonomis tidak menjadi jaminan untuk menjadi pemimpin yang baik, lebih melihat pada visi dan misi calon kandidat

Sumber: *Analisis Primer*

Berdasarkan pemetaan di atas, tampak bahwa pembelian suara (*vote buying*) merupakan strategi pemenangan yang tidak pasti dan lebih banyak mengandung dimensi pertarungan. Jika seorang kandidat hanya mengandalkan pada praktik politik uang (*vote buying*) tanpa menunjang dengan strategi lain seperti membangun kedekatan dengan calon pemilih atau memperkuat militansi tim sukses, besar kemungkinan ia akan kecewa dengan hasil akhir. Karena pada dasarnya uang bukan satu-satunya faktor penentu yang bisa mempengaruhi preferensi pemilih, bahkan untuk daerah seperti Desa Kasepuhan yang merupakan wilayah yang sudah jelas terlihat ada praktik politik uang.

Bapak Rusmadi, ketua PANWASLU Kabupaten Batang 2017 yang penulis temui mengatakan tentang sulitnya kasus politik uang untuk dibuktikan. Bapak Rusmadi mengatakan bahwa:

“Pada pilkada 2017, pelanggaran tindak pidana saat itu ditemukan dugaan politik uang. Ada saksi yang memberikan bukti berupa video pemberian uang kepada pemilih kepada PANWASLU, namun ketika kasus akan ditindaklanjuti, saksi menolak untuk datang, bahkan kabur dari Batang. Syarat kasus bisa ditindaklanjuti yaitu adanya dua orang saksi dan satu bukti, karena saksi tidak berhasil ditemui pihak PANWASLU, maka kasus tersebut ditutup.” (wawancara 07 April 2019).

Namun demikian, masyarakat yang terbiasa dengan adanya uang saat pemilu belum tentu mereka memilih calon kandidat yang memberikan uang. Mereka tetap pada pilihannya masing-masing sesuai pandangan mereka meskipun menerima uang dari calon kandidat yang bukan mereka pilih. Jadi pemberian uang tidak bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh suara pemilih. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rohmat mengenai makna politik uang.

“Sebenarnya politik uang sangat riskan untuk dijadikan strategi dalam masa pilkada. Politik uang disamping membutuhkan uang banyak, juga tidak ada jaminan yang pasti sesuai yang mereka targetkan. Ketika kita menyebar 100 amplop, belum tentu mereka mendapatkan 100 suara, bahkan tidak ada setengahnya. Politik uang juga membuat para calon kandidat yang menang akan bertindak semauanya karena merasa telah membeli suara rakyat dengan uang. Hal ini yang membuat dampak buruk dari kinerja seorang pemimpin. Hak-hak rakyat tidak terpenuhi, aspirasi tidak tersampaikan, dan integritas sangat lemah karena untuk menjadi menang mereka hanya mengandalkan uang, tidak benar-benar untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab kepada rakyatnya, dan rakyatpun juga yang akan terkena imbasnya. Seperti

naiknya harga BBM, pembangunan tidak merata, dan lain sebagainya.” (wawancara 05 April 2019).

Dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa pembelian suara adalah strategi yang membutuhkan biaya tinggi tetapi ternyata tidak begitu efektif untuk menunjang perolehan suara. Dari timses calon kandidat nomor 1 (satu) misalnya, mereka menyebar amplop sebanyak 450.000 amplop yang diberikan, hanya menghasilkan suara sekitar 20-25 persen. Tentu saja, bisa dikatakan juga bahwa strategi ini cukup beresiko tinggi. Meskipun para calon kandidat dan tim suksesnya merasa bahwa pemilih yang menjadi targetnya itu adalah basisnya, pada kenyataannya klaim basis ini sebagian besar hanya berdasarkan daftar pemilih yang disetorkan oleh para anggota tim sukses yang tidak semuanya dikontrol dengan baik.

Sikap pemilih dalam menanggapi dan memaknai politik uang dalam bentuk *vote buying* seperti pemaparan di atas tidak bisa dilepaskan dari rasa kekecewaan mereka terhadap institusi politik yang ternyata tidak mampu menjamin kesejahteraan mereka. Mereka juga terlihat kurang *respect* terhadap kebanyakan politisi yang justru hanya sibuk dengan kepentingannya masing-masing, bahkan sampai melakukan korupsi. Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan ini membuat semakin berat ketika dikaitkan dengan upaya pembangunan kesadaran sebagai warga negara di antara pemilih, warga negara yang menjadi subjek penting dalam proses perbaikan demokrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dibahas pada penelitian ini mengenai Praktik Politik Uang dan Pemaknaannya oleh Kelas Menengah dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengalaman kelas menengah di Kelurahan Kasepuhan dalam proses politik di daerahnya terkait dengan politik uang menunjukkan bahwa masyarakat masih menerima uang ketika pilkada. Dalam proses politik uang, penulis mengelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu (a) pendataan warga yang dilakukan oleh broker, (b) pemasangan stiker di rumah warga sebagai simbol, dan (c) modus pemberian uang ketika menjelang pilkada baik melalui kordes atau broker.
2. Tanggapan masyarakat Kelurahan Kasepuhan terhadap praktik politik uang dibedakan menjadi dua yaitu tanggapan masyarakat pragmatis dan oportunistis. Masyarakat pragmatis menerima uang karena mereka menganggap hal itulah yang membuat mereka memilih pemimpin. Kandidat yang memberikan mereka uang maka itulah yang dipilih ketika pilkada. Sedangkan masyarakat oportunistis menanggapi praktik politik uang sebagai hal yang wajar ketika pilkada, namun mereka tetap memilih pemimpin sesuai dengan keinginan mereka.
3. Masyarakat Kelurahan Kasepuhan dalam memaknai uang sangat beragam. Namun penulis memetakannya menjadi tiga bentuk pemaknaan sesuai dengan jenis pekerjaan. Pertama yaitu pemaknaan dari ibu-ibu rumah tangga, mereka memaknai politik uang sebagai sesuatu yang wajar. Maka hal itu mereka sambut dengan baik. Karena mendapatkan uang ketika pilkada merupakan sebuah rezeki. Kedua yaitu pemaknaan dari pekerja swasta dan karyawan. Mereka memaknai politik uang sebagai pengganti upah untuk datang ke TPS. Karena pada hari itu mereka libur kerja, jadi sebagai ganti rugi. Ketiga yaitu pemaknaan dari pemilih muda dan tenaga pendidik. Mereka memaknai politik uang sebagai suatu hal yang hanya bersifat ekonomis. Uang tidak menjamin untuk menghasilkan pemimpin yang baik selama lima tahun ke depan. Mereka lebih melihat kepada profil, visi dan misi calon kandidat untuk menentukan pilihannya.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki dalam mekanisme pilkada di Kelurahan Kasepuhan, diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya pengawasan yang maksimal dari PANWASLU terkait proses pilkada, baik sebelum, semasa, maupun setelah pilkada berlangsung.
2. Koordinasi antar PPS dan KPPS perlu ditingkatkan untuk meminimalisir adanya kecurangan dalam pilkada.
3. Kesadaran masyarakat tentang dampak politik uang perlu ditekankan lagi melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU dan juga pembelajaran dari pengalaman pilkada sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Ainiun, Yatimul. 2014. Tolak "Money Politics", Warga Gelar Aksi Gigit Uang, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2014/03/26/1211033/Tolak.Money.Politics.Warga.Gelar.Aksi.Gigit.Uang>.
- Aziz, Abdul. 2018. "12 Kasus Politik Uang di Pilbup Banyumas diusut Panwaslu, 2 Pelaku Kabur" dalam <https://m.merdeka.com/peristiwa/12-kasus-politik-uang-di-pilbup-banyumas-diusut-panwaslu-2-pelaku-kabur.html>, diakses pada 03 Januari 2019.
- Badoh, I dan Husodo A. 2009. *Memantau Korupsi Pemilu*. Jakarta: ICW & TIFA Foundation.
- Badoh, Ibrahim Zuhdhy Fahmi. Januari 2010. *Kajian Potensi-Potensi Korupsi Pilkada*. Jakarta: ICW.
- Bastaman.H. D. 1995. *Integrasi Psikologi Dengan Islam Menuju Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BN. Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Demanik, Ahmad Taufan. 2015. "Medan, Sumatera Utara: Antara Politik Etnik dan Politik Uang" dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi dkk. 2015. "Jakarta: Kesejahteraan Sosial dan Layanan untuk Konstituen di Kota Metropolitan" dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Donny. 2005. *Fenomenologi dan Hermeneutika: sebuah Perbandingan*. Dipublikasi oleh kalamenau.blogspot.
- Hadijaya. 1999. *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Hamdi, Ahmad Zainul. 2015. "Madiun, Jawa Timur: Peran Broker dalam Strategi Teritorial, Jaringan Sosial, dan Pembelian Suara" dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

- Hamidi, Ahsan Jamet. 2008. *Pemilu Tidak Bebas Politik Uang*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Heryanto, Ariel. 1999. "Kelas Menengah Yang Majemuk" dalam buku *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Ibrahim. 2015. "Bangka Belitung: Patronase dan Politik Identitas di Masyarakat Majemuk" dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Irmasari, Dewi. 2017. "Bawaslu RI: Ada 8 Dugaan Politik Uang di Pilgub DKI, 5 di Banten" dalam <https://m.detik.com/news/berita/d-3424442/bawaslu-ri-ada-8-dugaan-politik-uang-di-pilgub-dki-5-di-banten>, diakses pada 11 Oktober 2018.
- Jafar, T. Muhammad. 2015. "Bener Meriah, Aceh: Politik Uang dan Politik Etnisitas di Dapil Baru" dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Junaedi. 2018. *Resah dengan Politik Uang, Warga Deklarasikan "Kampung Bebas Money Politics"*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2014/03/26/1211033/Tolak.Money.Politics.Warga.Gelar.Aksi.Gigit.Uang>.
- Kana, Nico L. "Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa". *Jurnal Renai Tahun* 1, No.2, April-Mei 2001.
- KPU. 2017. *Pilkada Kabupaten Batang*, diakses dari https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/batang
- Kumolo, Thahjo. 2015. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Lande, C.H. 1977. *Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism*. dalam Steffen W. Schmidt & James C. Scott (eds.). *Friends, followers and factions a reader in political clientalism*, xiii-xxvii. Berkeley: University of California Press.
- Mahsun, Muhammad. 2015. "Kota Palembang, Sumatera Selatan: Dana Aspirasi dan Politik Klientelisme" dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

- Mahsun, Muhammad. 2017. *"Peasants and Politics: Achievements and Limits of Ppopolar Agency in Batang, Central Java"* dalam buku *Contemporary Southeast Asi*. Singapore: ISEAS.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naisaban, Ladislaus, (2004). *"Para Psikolog Terkemuka Dunia"*. Jakarta:PT. Grasindo.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2015. *Sosiologi Umum*. Jakarta: FEM IPB & Pustaka Obor.
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oktafia, Serly (2008). Skripsi. *"Hubungan Antara Dukungan Teman Sebaya Dengan Kebermaknaan Hidup Pada Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan"*. Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Oktafia, Serly. 2008. Skripsi. *"Hubungan Antara Dukungan Sebaya Dengan Kebermaknaan Hidup Pada Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan"*. Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Paskarina, Caroline. 2015. *"Jawa Barat: Silaturrahi, Jaringan Personal, dan Politik Patronase"* dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Permana, Dian Ade. 2018. *"Kasus Politik Uang Pilkada Temanggung dilimpahkan ke Polisi"*, dalam <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus/-politik-uang-pilkada-temanggung-dilimpahkan-ke-polisi.html>, diakses pada 03 Januari 2019.
- Philipus, Ng. dan Aini, Nurul. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, L.M. 2017. *"BAWASLU temukan 600 dugaan politik uang padapilkada2017"*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temuka.n.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017>, diakses pada 11 Oktober 2018.
- Ramdhani, Dian. 2017. *"Bawaslu Temukan 600 Kasus Politik Uang Selama Masa Pilkada"*, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/bawaslu->

[temukan-600-kasus-politik-uang-selama-masa-pilkada-2017-1487078213](#), diakses pada 11 Oktober 2018.


























- Reksoprayitno, 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika.
- Rifai, Amzulian. 2003. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rochim, Ifaa. (2009). Skripsi. “*Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kebermaknaan Hidup Pada Santriwati Muallimin Pondok Pesantren Al-Mukmin Sukoharjo*”. Fakultas Agama Islam Surakarta.
- Rochim, Ifaa. (2009). Skripsi. “*Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kebermaknaan Hidup Pada Santriwati Muallimin Pondok Pesantren Al-Mukmin Sukoharjo*”. Fakultas Agama Islam Surakarta.
- Schaffer, Frederic Charles. 2007. *Elections For Sale*. Filipina: Ateneo De Manila University Press.
- Schroder, Peter. 2009. *Strategi Politik*. Jakarta: Freuderic-Neumann-Shiftung.
- Scott, J.C. 1972. *Patron-client politics and political change in Southeast Asia*, dalam *The American Political Science Review*. Published by: American Political Science Association. Vol 66, No 1, Maret 1972.
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. 2009. *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.
- Soekanto, Sorjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press .
- Subakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sudarsono, Juwono. 1999. “*Demokrasi Lapisan Menengah*” buku *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Sudarsono, Juwono. 1999. “*Kelas Menengah dalam*” buku *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Sudjarwo dan Basrowi, 2008. *Pranata Dan Sistem Pendidikan*. Kediri: Jenggala Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmajati, Mada dan Aspinal, Edward. 2015, “*Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia*” dalam buku *Politik Uang di*

- Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014.*
Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Sukmajati, Mada dan Aspinall, Edward. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014.* Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tim Peneliti KPU Bandung Barat, 2014. “*Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus Di Kabupaten Bandung Barat*” dalam https://kpu.go.id/koleksigambar/Praktek_Politik_Uang_pd_Pemilu_Legislatif_2014_Bandung_Barat.pdf, diakses pada 28 Oktober 2018.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Van Klinken, Gerry dan Berenschot, Ward. 2016. *In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Lampiran-Lampiran


Lampiran 1


Peta TPS Kelurahan Kasepuhan Pada Pilkada 2017


1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 
11 	12 	13 	14 	15 
16 	17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 	25 


Keterangan:


Berdasarkan RT:


 = RT 1


 = RT 4


 = RT 7


 = RT 2

 = RT 5


 = RT 8


 = RT 3


 = RT 6


 = RT 9


Berdasarkan RW:


 = RW 1

 = RW 4

 = RW 2

 = RW 5

 = RW 3

 = RW 6

Lampiran 2

Daftar Pemilih Tetap Desa Kasepuhan Pada Pemilihan Kepala Daerah 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
DESA/KELURAHAN KASEPUHAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

NO	LOKASI DPT	JUMLAH DPT		JUMLAH DPT KESELURUHAN
		LAKI-LAKI (LK)	PEREMPUAN (P)	
1	TPS 1	167	199	366
2	TPS 2	267	297	564
3	TPS 3	188	183	371
4	TPS 4	226	234	460
5	TPS 5	273	258	531
6	TPS 6	261	229	490
7	TPS 7	257	248	505
8	TPS 8	160	158	318
9	TPS 9	165	161	326
10	TPS 10	212	210	422
11	TPS 11	185	187	372
12	TPS 12	223	237	440
13	TPS 13	282	252	534
14	TPS 14	154	167	321
15	TPS 15	187	180	367
16	TPS 16	242	273	515
17	TPS 17	181	171	352
18	TPS 18	214	209	423
19	TPS 19	187	164	351
20	TPS 20	267	260	527
21	TPS 21	232	209	441
22	TPS 22	214	211	425
23	TPS 23	268	277	545
24	TPS 24	144	148	292
25	TPS 25	216	230	446
TOTAL				10631

Mengetahui
Lurah Kasepuhan
KELURAHAN
KASEPUHAN
P. RW. DKO, S.Pd
NIP. 19620307 198304 1 004

Lampiran 3

Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Periode 2017-2022 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

BERITA ACARA

NOMOR 17/PL.03.7-BA/3325/02/KPU-Kab/III/ 2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
PERIODE 2017 - 2022 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang hasil Pemilihan Tahun 2017.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, memutuskan nama pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang adalah Saudara H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Saudara Suyono, S.IP, M.Si.

Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Batang adalah:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 199/KPU/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 225/KPU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang Telah Diregistrasi;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 123/PL.03.7-SD/33/Prov/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilkada Serentak 2017 Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, tanggal 22 Februari 2017;
5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB1-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, tanggal 22 Februari 2017;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

1. Adi Pranoto

2. Nur Tofan

3. Umar Abdul Jabbar

4. Yakub Widodo

5. Gunadi Fitrianto



(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

Lampiran 4
Keputusan KPU Kabupaten Batang



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2017
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
PERIODE 2017 - 2022 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Periode 2017 - 2022 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 199/KPU/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 225/KPU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang Telah Diregistrasi;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 123/PL.03.7-SD/33/Prov/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilkada Serentak 2017 Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan;
 4. Berita Acara Nomor 17/PL.03.7-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Periode 2017 - 2022 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG PERIODE 2017 - 2022 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) Saudara H. WIHAJI, S.Ag, M.Pd dan Saudara SUYONO, S.IP, M.Si, dengan perolehan suara sebanyak 245.181 (dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh satu) suara atau 56,6% (lima puluh enam koma enam persen) dari total suara sah Kabupaten Batang sebanyak 432.942 (empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua) suara.

Lampiran 5

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara



**MODEL
DA-KWK**

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** Bulan **Februari** tahun **dua ribu tujuh belas**, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Batang mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di : Pendopo Kecamatan Batang.


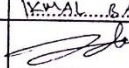
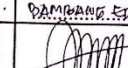
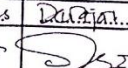
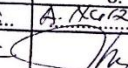
Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

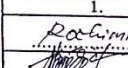
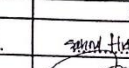
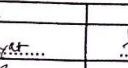
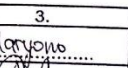
- dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano.
- dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 9 (Sembilan) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	2.	3.	4.	5.
ZAEVA.....F	KEMAL.....B.A.	DAMBANG.....EDUS	DARAFAT.....S.	A. NGURIP
				

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.	4.
DAGIMAN.....	SANDI.....HARIS	HARJONO.....
			

Catatan :
 *) Coret yang tidak perlu.
 **) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENYUTONGAN PEROLEHAN SUARA PARTI BERTAS DAERAH/KEWILAYAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BERSIAP DAN WAKIL BAKANG TAHUN 2017
dari Pembentukan Panitia Pemilu 2017/2018

NOPEK DA 1/1978
Halaman 1

KECAMATAN : BAYANG
KABUPATEN : BAYANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH DAN PEROLEHAN SUARA																				
1. DATA TERMINAL																				
1. Pemilih terdaftar (DPT)																				
JK	1084	946	1748	1067	2020	928	2115	1270	1028	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
PK	2079	925	1826	1106	1141	1895	4842	2232	3003	10724	10724	10724	10724	10724	10724	10724	10724	10724	10724	10724
LK	502	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pemilih terdaftar dalam DPP																				
JK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PK	62	12	13	5	20	0	11	4	7	72	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0
LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pemilih (DPT) / Pemungutan NTP/Pelekonik dan Suara Ketersangan																				
JK	18	27	23	12	32	12	23	11	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
PK	112	27	22	12	22	12	22	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
LK	112	27	22	12	22	12	22	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JML	214	186	318	186	318	186	318	186	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
4. Jumlah seluruh pemungutan hak pilih (1-2-3)																				
JK	777	766	1301	982	1190	739	1868	832	781	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
PK	1489	1046	1867	1061	1486	803	3065	1126	1310	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872
LK	2978	1546	2790	2058	2314	1461	5456	1989	2028	5456	5456	5456	5456	5456	5456	5456	5456	5456	5456	5456
JML	6844	4858	8958	4101	5790	2964	12409	4877	4166	11316	11316	11316	11316	11316	11316	11316	11316	11316	11316	11316
5. Pemungutan hak pilih dalam DPP/pelekonik NTP/Pelekonik dan Suara Ketersangan																				
JK	18	27	23	12	32	12	23	11	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
PK	112	27	22	12	22	12	22	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
LK	112	27	22	12	22	12	22	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JML	214	186	318	186	318	186	318	186	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
6. Jumlah seluruh pemungutan hak pilih (1-2-3-4)																				
JK	795	793	1324	994	1222	750	1886	849	791	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
PK	1501	1058	1865	1073	1500	815	3083	1138	1318	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988
LK	2992	1586	2830	2071	2316	1465	5469	1993	2046	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469
JML	7484	5237	9014	4148	5548	2970	12458	5332	4155	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462
B. DATA PEMILIH DIBALUT / PERAWANG CACAT																				
1. Pemilih dibalut/perawang cacat																				
JK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pemilih dibalut/perawang cacat dan Suara Ketersangan																				
JK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. RINGKASAN																				
JK	795	793	1324	994	1222	750	1886	849	791	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
PK	1501	1058	1865	1073	1500	815	3083	1138	1318	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988
LK	2992	1586	2830	2071	2316	1465	5469	1993	2046	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469
JML	7484	5237	9014	4148	5548	2970	12458	5332	4155	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462	11462

PANITIA
KECAMATAN
BAYANG

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendaharawan
4. Anggota

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendaharawan
4. Anggota

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendaharawan
4. Anggota

NO.	URAIAN	1	2	REKOR				REKOR				JUMLAH ANH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				JUMLAH PERKAWIN	PERKAWIN	PERKAWIN	PERKAWIN	JUMLAH PERKAWIN	PERKAWIN	PERKAWIN	PERKAWIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A.	DATA PEMILIH DAN PEROGUNA HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

DAFTAR PEMILIH DAN PEROGUNA HAK PILIH

1. Pemoguna hak pilih dalam DPR

2. Pemoguna hak pilih dalam DPRD

3. Pemoguna hak pilih dalam DPRD/Pemoguna KTR Ekstrim

4. Jumlah seluruh pemoguna hak pilih (1+2+3)

URAIAN

DATA PEMILIH DAN PEROGUNA HAK PILIH

1. Pemoguna hak pilih dalam DPR

2. Pemoguna hak pilih dalam DPRD

3. Pemoguna hak pilih dalam DPRD/Pemoguna KTR Ekstrim

4. Jumlah seluruh pemoguna hak pilih (1+2+3)

Jumlah pemilih
Jumlah pemoguna hak pilih dalam DPR
Jumlah pemoguna hak pilih dalam DPRD
Jumlah pemoguna hak pilih dalam DPRD/Pemoguna KTR Ekstrim
Jumlah seluruh pemoguna hak pilih (1+2+3)

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
: BANYU
: BANYU
: JAWA TENGGAH

NOBEL DAM KRM
Halaman 1 - 1

KECAMATAN : BATANG
 KABUPATEN : BATANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAFTAR
 Halaman 2

NO.	URUTAN	RINCIAN												JUMLAH PEROLEHAN						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2-3-4)	2115	1919	1.074	2.045	11.722	1.035	4.973	2.390	3.083	11.023	2.847	1.651	1.381	1.101	4.862	1.093	1.101	4.862	56.920
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak (m/dulu ke/luar kotak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jumlah surat suara yang tidak terdistribusi	513	346	871	347	2.799	352	1.120	615	1.001	2.778	641	297	298	158	1.071	1.093	1.093	1.071	13.512
4.	Jumlah surat suara yang dikembalikan	1.570	1.573	2.802	2.068	9.011	1.643	3.843	1.972	2.082	8.229	2.195	1.354	1.093	943	3.188	1.093	1.093	3.188	43.438

NO.	URUTAN	RINCIAN												JUMLAH PEROLEHAN						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	
1.	Jumlah Surat Suara Seluruh Cahin	1.534	1.533	2.079	1.973	8.518	1.463	3.027	1.942	2.033	7.742	2.082	1.317	1.068	994	3.077	1.093	1.093	3.077	41.512
2.	Jumlah Surat Suara Tidak Sah (1 - 2)	36	40	123	85	483	50	215	30	-9	487	113	37	35	39	111	111	111	111	1.943
3.	Jumlah Surat Suara yang Tidak Sah (1 - 2)	1.570	1.573	2.802	2.068	9.011	1.543	3.843	1.972	2.082	8.229	2.195	1.354	1.093	943	3.188	1.093	1.093	3.188	43.438

NO.	URUTAN	RINCIAN												JUMLAH PEROLEHAN						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	
1.	II. Widy. S.AE. M.Pd dan Suyono, S.Pd, M.Si	1.083	769	1.349	1.279	4.300	794	2.037	874	906	4.051	1.190	409	615	535	1.408	1.093	1.093	1.408	22.280
2.	Dr. Lutfan Huseinawati, S.Pd dan II Nuhaji Shariq Urip	234	291	576	422	1.964	342	647	839	1.037	1.410	344	237	178	140	327	178	178	327	9.975
3.	Asn. Hartono, S.Ak dan Kasmu Atmaw, S.Pd	196	172	500	250	2.087	310	885	299	59	1.770	507	570	284	157	460	284	284	460	6.519
4.	Abdullah Fadri, ST dan Jenggot, Yulianto	21	10	54	42	158	38	58	20	11	111	44	11	7	12	32	32	32	32	629
	Candah Bener dan Jenggot	1.584	1.353	2.079	1.973	8.518	1.493	3.027	1.942	2.033	7.742	2.082	1.317	1.068	994	3.077	1.093	1.093	3.077	41.512

PANITIA

KESKAMPINGAN
SATAPAN

1. Ketua	2. Sekretaris	3. Bendahara	4. Anggota
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

MODEL DAFTAR RENCANA
 RENCANA
 RENCANA

KEKAMPARAN
 KABUPATEN
 PROVINSI

RAYA
 JAWA TIMUR

NO.	URAIAN	RENCANA																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Jumlah Akhir
1	Amal yang sangat baik dan berguna	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Amal yang baik dan berguna	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
3	Amal yang baik dan berguna	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4	Amal yang sangat baik dan berguna	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Jumlah		41.405	42.804	44.203	45.602	47.001	48.400	49.800	51.200	52.600	54.000	55.400	56.800	58.200	59.600	61.000	62.400	63.800	65.200

NO.	URAIAN	RENCANA																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Jumlah Akhir
1	Amal yang sangat baik dan berguna	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Amal yang baik dan berguna	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
3	Amal yang baik dan berguna	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4	Amal yang sangat baik dan berguna	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Jumlah		41.405	42.804	44.203	45.602	47.001	48.400	49.800	51.200	52.600	54.000	55.400	56.800	58.200	59.600	61.000	62.400	63.800	65.200

NO.	URAIAN	RENCANA																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Jumlah Akhir
1	Amal yang sangat baik dan berguna	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Amal yang baik dan berguna	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
3	Amal yang baik dan berguna	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4	Amal yang sangat baik dan berguna	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Jumlah		41.405	42.804	44.203	45.602	47.001	48.400	49.800	51.200	52.600	54.000	55.400	56.800	58.200	59.600	61.000	62.400	63.800	65.200




REKOR
 RATA
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

REKOR RATA
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

Lampiran 6

Surat Izin Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <i>Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. 024 76435986 Semarang 50185</i></p>
Nomor : B-249/Un.10.6/K/PP.00.9/03/2019	22 Maret 2019
Lamp. : -	
Hal : Permohonan Ijin Penelitian	
Kepada Yth. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Batang di Batang <i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dengan hormat kami beritahukan bahwa untuk mendapatkan pengayaan informasi pengalaman lapangan dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian.	
Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang <i>Dinamika Pelaksanaan Pilkada 2017 di Batang: Antara Politik Pragmatik dan Patronase Politik.</i>	
Nama : Zumrotun Na'imah	
NIM : 1506016001	
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo	
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
	 A.n. Dekan Kabag. Tata Usaha Muhammad Royani
Tembusan : Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)	

Keterangan:

Surat izin penelitian dibuat dengan judul penelitian dikarenakan mempertimbangkan judul penelitian yang sebenarnya sangat riskan untuk mendapat data yang sebenarnya



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telp. (0285) 391131, 392131 Fax. (0285) 391131

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/087/2019

- I. DASAR : a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014.
b) Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2004.
- II. MENARIK : Surat Kepala Kesbangpol Kabupaten Batang Nomor : 070/078/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : ZUMROTUN NA'IMAH
2. Pekerjaan : Mahasiswa UIN Wali Songo Semarang
3. Alamat : Jungpasir RT.002/004 Kec.Wedung Kab.Demak
4. Penanggungjawab : **Muhammad Royani**
5. Maksud & tujuan : Permohonan Ijin Penelitian guna Menyusun Skripsi dengan judul "*Dinamika Pelaksanaan Pilkada 2017 di Batang : Antara Politik Pragmatik dan Patronase Politik*"
6. Lokasi : Kabupaten Batang.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum melaksanakan penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi langsung kepada responden/masyarakat, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penguasa/pimpinan setempat;
 - c. Setelah penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.
- IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 25 Maret – 25 April 2019.

DIKELUARKAN DI : B A T A N G
PADA TANGGAL : 25 Maret 2019

A.n. BUPATI BATANG
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BATANG



Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kesbangpol Kab. Batang;
2.;
3. Arsip.

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama : Zumrotun Na'imah
2. NIM : 1506016001
3. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 09 November 1996
4. Alamat : Jungpasir Rt 02 Rw 04 Wedung Demak
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 081229067169
8. Email : nimahzumrotun@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1	TK Ibu Pertiwi Wilalung	2004
2	SD Gedangalas 2	2009
3	SMP IT Uswatun Hasanah Semarang	2012
4	SMK Negeri 9 Semarang	2015

2. Pendidikan Non Formal

No	Lembaga Pendidikan	Tahun Kelulusan
1	Brilliant English Course Pare Kediri	Agustus 2016
2	Al-Azhar Arabic Course Pare Kediri	Februari 2017
3	Elfast Kampung Inggris Pare Kediri	Agustus 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juli 2019

Zumrotun Na'imah
1506016001

